

HOTLINE REDAKSI

Telp. (0751) 25001-36923
Fax. (0751) 33572
email : singgalang.redaksi@gmail.com
website : www.hariansinggalang.co.id
epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

INFO & PENGADUAN

Tlp. (0751) 25001-38338
Fax. (0751) 811005
Iklan : 08126605015
Pemasaran : 085355173999
Redaksi : (0751) 36923
email: iklsinggalang@yahoo.co.id

Rabu, 12 Agustus 2026 (27 Syafar 1448 H)

Rp5.000,-
Luar Kota
+ Ongkos Kirim



Jadwal Shalat Hari Ini

Subuh : 05.04 WIB
Zuhur : 12.27 WIB
Ashar : 15.47 WIB
Maghrib : 18.29 WIB
Isya : 19.40 WIB

Sumber: detikhikmah

KOMENTAR

Sepatu Karet dan Cara Kita Menilai Riset

ADNAN

PADA Kamis, 6 Agustus 2026, salah satu perangkat yang saya kembangkan berada di antara lebih dari 200 hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Merdeka, Jakarta. Sekitar 150 peneliti dan perekayasa hadir membawa berbagai hasil penelitian, mulai dari sektor energi, mineral, kesehatan, pangan, kedirgantaraan, hingga teknologi nuklir.

Perangkat yang ditampilkan adalah alat deteksi cepat unsur hara tanah berbasis inframerah dekat. Alat tersebut dikembangkan untuk memperkirakan kandungan nitrogen, fosfor, kalium, bahan organik, dan tingkat keasaman tanah dalam waktu kurang dari lima menit. Harapannya sederhana: informasi kondisi tanah dapat diperoleh lebih cepat sehingga petani memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan pengelolaan lahannya.

Namun, beberapa hari setelah pameran, perhatian publik di media sosial justru banyak tertuju pada produk yang secara visual jauh lebih sederhana, seperti sepatu karet, genteng komposit, dan keripik ubi.

Fenomena ini menarik. Bukan karena publik tidak boleh mempertanyakan hasil riset. Sebaliknya, lembaga penelitian yang menggunakan sumber daya publik memang harus terbuka terhadap kritik. Persoalannya adalah bagaimana sebuah hasil riset dinilai: apakah cukup hanya dengan melihat bentuk produk akhirnya?

Bersambung ke A-7

Zakat Penghasilan
Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui

mandiri **111.000.500.4888**
a.n Dompot Dhuafa Singgalang

BSI **234.22222.40**
a.n Dompot Dhuafa Republika

Informasi: (0751) 40098 & 081267023333

www.ddsinggalang.org

Pojok

- + Ibu dan Nenek Dihabisi Anak Kandung Sendiri
- Astaghfirullah! azim...
- + Kemenhaj Sumbar Awasi Travel Umrah tak Berizin
- Rancak...!

terganasal



MENYEBERANGI SUNGAI

Warga mengendarai sepeda motor menyeberangi Sungai Batang Belimbing di Kampung Tanjung, Kuranji, Padang, Sumatera Barat, Selasa (11/8). Warga memilih menyeberangi sungai karena jembatan sebagai akses utama sedang diperbaiki, sedangkan jalan alternatif mengharuskan mereka menempuh jarak lebih jauh. (Antara/fitra yogi)

PASBAR GEMPAR

Ibu dan Nenek Dihabisi Anak Kandung Sendiri

PASBAR - SINGGALANG

Seorang anak di Jorong Sungai Tanang, Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, tega menghabisi ibu kandung dan neneknya sendiri. Kedua korban yang sudah lansia itu ditemukan tak bernyawa, sekitar pukul 06.00 WIB, Selasa (11/8).

Dua perempuan malang itu dihabisi dengan sepotong kayu oleh pelaku inisial "H" (34), Senin (10/8) sekitar pukul 19.00 WIB. Kedua korban diketahui masing-masing bernama Hapni (65), yang



TKP - Masyarakat berdatangan ke tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan di Jorong Sungai Tanang, Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (11/8) kemarin. (arafat)

merupakan ibu kandung terduga pelaku, dan Rohma (90), merupakan nenek terduga pelaku.

Setelah kejadian, kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumahnya. Sementara H meninggalkan lokasi dan diduga lari menuju rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Lembah Melintang.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata membenarkan kejadian tersebut serta melakukan penangkapan terhadap H. Ia menjelaskan, terduga pelaku diamankan Tim Opsnal Satreskrim yang dipimpin Ipda Alginio

Bersambung ke A-7

Kemenhaj Sumbar Awasi Travel Umrah tak Berizin



M. Rifki

Padang, Singgalang

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar) akan terus memperkuat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau sering disebut travel umrah yang belum mengantongi izin operasional. Langkah tersebut menjadi peringatan, agar pihak travel tidak menjalankan kegiatan penyelenggaraan umrah di luar ketentuan, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan

Bersambung ke A-7

Mendagri Siapkan 3 Skema Bayar Gaji PPPK di Daerah



Muhammad Tito Karnavian

JAKARTA - Tiga skema disiapkan untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap bisa dilakukan dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Bersambung ke A-7

ADVERTORIAL

Bapenda Sumbar Buru PAP Senilai Rp 114 Miliar



KETERANGAN PERS - Kepala Bapenda Sumbar, Al Amin, S.Sos, M.M dan jajaran memberikan keterangan pers terkait tunggakan PAP di sektor pertanian yang mencapai miliaran rupiah. (ist)

PADANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah tegas terkait tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) di sektor perkebunan. Tak tanggung-tanggung, nilai pajak terutang dari para pelaku usaha perkebunan di Sumbar saat ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 114,1 miliar.

Berdasarkan data penghitungan Bapenda Sumbar, total kewajiban pajak yang dicatat mencapai Rp114.

Bersambung ke A-7

RAYAKAN HUT KE-81 RI DENGAN GEMBIRA

Waspadai Provokasi Demo Anarkis



Muhammad Qodari

JAKARTA - Pemerintah mengajak masyarakat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dengan riang gembira. Momentum kemerdekaan tahun ini di-

arahkan menjadi ruang kebersamaan yang melibatkan publik, sekaligus diisi kegiatan positif dengan suasana yang hangat dan tetap tertib.

Kepala Badan Komuni-

kasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah ingin perayaan kemerdekaan lebih dekat dengan masyarakat. Partisipasi warga juga dibuka seluas-luasnya dalam berbagai rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI.

"Kita ingin bulan kemerdekaan menjadi ruang perayaan milik kita semua. Sebuah ruang partisipasi publik yang benar-benar terbuka dan inklusif," kata Qodari, kemarin.

Menurut dia, peringatan kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni kenegaraan. Masyarakat perlu merasakan

Bersambung ke A-2

Dua Terduga Pelaku Pencurian di Rumah Kosong Diamankan

PASBAR - SINGGALANG

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pasaman Barat (Pasbar) berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian rumah kosong di wilayah hukumnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial YS (30) dan AM (34).

Kedua terduga pelaku diamankan Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat, Senin (10/8) sekitar pukul 18.30 WIB.

Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan mengumpulkan informasi terkait laporan pencurian yang terjadi di Perumahan Yaptip, Gang Semangka, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/VIII/2026/SPKT/Polres/Pasaman Barat tertanggal 10 Agustus 2026. Menurutnya, setelah menerima laporan, petugas langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan informasi di lapangan.

Kasus tersebut diketahui setelah seorang saksi pada Jumat (7/8) sekitar pukul 11.00 WIB melihat pintu depan rumah milik Dede Ochsandre dalam kondisi terbuka.

Saksi juga menemukan be-



AMANKAN
Pelaku dan barang bukti saat diamankan di Mapolres Pasbar, Selasa (11/8). (arafat)

kas congkelan pada bagian pintu. Setelah memeriksa kondisi rumah, diketahui sejumlah barang milik korban telah hilang. Karena korban sedang berada di Rutan Polres Pasaman Barat terkait perkara dugaan penyalahgunaan narkotika, korban meminta saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim yang dipimpin Ipd Algino Ganaro melakukan penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai identitas dan keberadaan para terduga pelaku.

Polisi kemudian bergerak dan mengamankan YS di sebuah warung di Jalan KKN, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, sedangkan AM ditangkap di rumahnya di Jorong Pasaman Baru.

“Setelah dilakukan interogasi awal, kedua terduga pel-

ku mengakui telah melakukan pencurian di rumah korban,” ujarnya.

Dari pemeriksaan awal, polisi mendapatkan keterangan bahwa sejumlah barang milik korban telah diambil, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, satu unit mesin cuci merek Sharp, serta satu batang besi AS baling-baling kapal dengan panjang sekitar 3,5 meter.

Menurut keterangan kedua terduga pelaku, sepeda motor Honda Beat tersebut diambil dengan cara didorong dan kemudian dibawa ke sebuah bengkel di kawasan Simpang Pasaman Baru.

Sementara mesin cuci merek Sharp berwarna putih dibawa menggunakan becak motor yang disewa kedua pelaku. Mesin cuci tersebut kemudian dijual kepada seorang warga di Jorong Tengah Padang, Nagari

Batang Biyu, seharga Rp600 ribu.

Setelah itu, kedua pelaku untuk mengambil satu batang besi AS baling-baling kapal. Barang tersebut kemudian dititipkan kepada seorang teman mereka di Jorong Batang Tian, Nagari Lingkuang Aua.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam aksi pencurian tersebut.

Saat ini, kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (arafat)

Warga Ketaping Diajak Kenali Potensi Bencana

PADANG PARIAMAN - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sitti Izzati Aziz, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana kepada warga Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Minggu pagi (9/8).

Kegiatan yang berlangsung di Pondok Lesehan Eby "Piak Nona", Jalan Akses Bandara ini dihadiri oleh masyarakat setempat, Wali Nagari Ketaping terpilih Dasman, serta Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar Acil Erbara.

Dalam pemaparannya, Sitti Izzati Aziz menekankan pentingnya mendorong pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana.

Mengingat Sumbar merupakan daerah rawan bencana, kesiapsiagaan warga menjadi kunci utama dalam menekan risiko dan dampak kerugian.

"Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman regulasi dan langkah evakuasi harus terus ditingkatkan," ujar Sitti.

Sitti menjelaskan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2023 menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk bergerak secara terencana, terpadu, terkoordinasi, serta menyeluruh.

Ia juga mengajak warga Ketaping mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar demi memahami langkah antisipasi sebelum, saat dan pascabencana.

"Kuncinya ada pada kesiapsiagaan. Dengan bekal pengetahuan yang matang, kita bisa meminimalkan risiko sekaligus menyelamatkan lebih banyak jiwa saat terjadi darurat," tambahnya.

Senada dengan hal itu, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Sumbar, Acil Erbara, mengingatkan bahwa masyarakat adalah garda terdepan saat bencana melanda.

Menurutnya, penguatan kapasitas warga di tingkat nagari harus menjadi prioritas bersama.

Wali Nagari Ketaping terpilih, Dasman, mengapresiasi edukasi regulasi ini. Ia berharap sosialisasi tersebut mampu memberikan panduan praktis bagi warga dalam menghadapi situasi darurat di lapangan. (401)



Sosialisasi perda tentang penanggulangan bencana oleh anggota DPRD Sumbar Sitti Izzati Aziz di Ketaping, Padang Pariaman. (ist)

DINILAI TAK SESUAI SPESIFIKASI

Proyek Sabodam Rp249,8 Miliar di Agam Disorot

Agam, Singgalang

Proyek pembangunan bangunan pengendali lahar dan sedimen Gunung Marapi (Sabodam) di aliran Sungai Batang Jabua, Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, mendadak jadi sorotan.

Forum Peduli Canduang Koto Laweh menduga pelaksanaan pekerjaan infrastruktur senilai ratusan miliar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Sekretaris Forum Peduli Canduang Koto Laweh, Budi Anda, mengungkapkan, perbedaan mencolok terlihat pada metode pekerjaan pengecoran beton. Kendati demikian, pihak forum tetap meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada penurunan kualitas struktur.

"Kami sangat mengapresiasi pemerintah atas alokasi anggaran ini untuk mengantisipasi bencana galodo (banjir bandang). Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan mutu proyek tetap terjaga. Jika dikerjakan asal-asalan dan melenceng dari RAB, masyarakat sekitar yang akan menanggung risikonya jika bencana kembali terjadi," tegas Budi.

Bantah

Menanggapi tuduhan tersebut, Konsultan Pelaksana Proyek, Legiono membantah keras anggapan bahwa pihaknya bekerja di luar spesifikasi teknis.



SABODAM - Inilah proyek pembangunan bangunan pengendali lahar dan sedimen Gunung Marapi (Sabodam) di aliran Sungai Batang Jabua, Nagari Canduang Koto Laweh yang saat ini menjadi sorotan warga. (ist)

jadi alasan kendaraan ready mix tidak bisa menjangkau lokasi.

Kendati demikian, pihak forum tetap meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V melakukan pengawasan secara ketat agar tidak ada penurunan kualitas struktur.

"Kami sangat mengapresiasi pemerintah atas alokasi anggaran ini untuk mengantisipasi bencana galodo (banjir bandang). Pengawasan yang kami lakukan bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan mutu proyek tetap terjaga. Jika dikerjakan asal-asalan dan melenceng dari RAB, masyarakat sekitar yang akan menanggung risikonya jika bencana kembali terjadi," tegas Budi.

Menanggapi tuduhan tersebut, Konsultan Pelaksana Proyek, Legiono membantah keras anggapan bahwa pihaknya bekerja di luar spesifikasi teknis.

Ia menegaskan, sistem pencampuran yang digunakan di lapangan tetap memenuhi standar mutu kekuatan beton yang disyaratkan.

Legiono menjelaskan, sistem yang mereka gunakan di lapangan adalah metode batching plant lapangan (batching plong), bukan sekadar pengadukan manual biasa.

"Jika menggunakan batching plant umum, kita membeli beton ready mix dari pabrik luar. Sementara dengan batching plong, material kita olah sendiri di lokasi dan diangkut ke titik pengecoran menggunakan truk mixer berkapasitas 7 meter kubik," jelas Legiono didampingi Kontraktor Pelaksana Subur Berkah KSO, Indra Affandi, Senin (10/8).

Guna menjamin mutu beton tetap berada pada standar FC 15 dan FC 20, pelaksana menerapkan prosedur Quality Control (QC) yang ketat.

Pada setiap truk pengangkut

beton, petugas mengambil sampel cetakan silinder untuk diuji kekuatannya di dua laboratorium berbeda, yakni laboratorium internal dan laboratorium UPTD resmi.

"Kami juga tidak menggunakan material galian C dari lokasi setempat karena belum berizin. Semua bahan baku seperti pasir, split dan semen pasok dari supplier resmi. Jadi kami tegaskan, penggunaan batching plong sama sekali tidak mengurangi mutu bangunan," tambah Legiono.

Berdasarkan pantauan media di lokasi proyek, tampak tumpukan material semen, pasir dan split berada sekitar 100 meter dari titik utama pengecoran.

Di area tersebut juga disiagakan satu unit truk mixer roda 10 berkapasitas 7 meter kubik dan satu unit ekskavator. Akses jalan menuju lokasi pengerjaan pun sejetinya masih dapat dilalui oleh kendaraan bertonase besar.

Bangunan Sabodam di Sungai Batang Jabua ini dirancang memiliki struktur megah bertingkat tiga. Bagian teratas dirancang dengan lebar sekitar 20 meter, sedangkan bagian dasar memiliki lebar 14 meter dengan ketinggian total struktur mencapai 12 meter.

Pembangunan Sabodam di Nagari Canduang Koto Laweh ini sendiri merupakan bagian dari paket mega proyek penanggulangan bencana Gunung Marapi senilai Rp249,8 miliar yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Agam dan Kab. Tanah Datar. (203)

KISAH AWAK PERTAMINA MENEMBUS JALUR PERANG DAN PULANG DENGAN SELAMAT

"Akhirnya Kami Keluar dari Hormuz"

JAKARTA - Senyum itu akhirnya denganembang. Setelah berbulan-bulan berada di kawasan Teluk Arab yang diliputi ketegangan geopolitik, Rizqi Raffif bisa kembali melihat perairan Indonesia dari geladak kapal yang ia tumpangi.

"Kami senang akhirnya berhasil keluar dari Hormuz," ucapnya, kemarin.

Kalimat singkat itu meluncur spontan dari awak kapal VLCC Pertamina Pride tersebut saat disambut manajemen PT Pertamina International Shipping (PIS) melalui konferensi video. Bagi banyak orang, itu mungkin hanya ungkapan biasa. Namun bagi Rizqi dan rekan-rekannya, kalimat itu menyimpan cerita panjang tentang kecemasan, keberanian, dan harapan yang mereka bawa selama melintasi salah satu jalur pelayaran paling sensitif di dunia.

Rizqi, yang bertugas sebagai Second Officer di Pertamina Pride, bersama 22 awak kapal lainnya dari pekerjaan sehari-hari. Namun kali ini tantangan yang mereka hadapi bukan hanya alam. Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah membuat setiap keputusan navigasi harus diambil dengan



jam-jam yang terasa berjalan lambat.

Bagi pelaut, ombak tinggi, badai, dan cuaca buruk adalah bagian dari pekerjaan sehari-hari. Namun kali ini tantangan yang mereka hadapi bukan hanya alam. Konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah membuat setiap keputusan navigasi harus diambil dengan

penuh kehati-hatian.

Ketegangan serupa juga dirasakan Daryl Josua Makaminang, Third Officer kapal Gamsunoro. Kapalnya lebih dulu melintasi Selat Hormuz pada 25 Juni melalui jalur selatan dengan pengawasan Angkatan Laut Amerika Serikat.

Saat itu, suasana perang masih terasa nyata.

"Kami tentu cukup khawatir dengan situasi perang saat itu. Syukurlah kami bisa melewati Selat Hormuz dengan selamat," ujar Daryl.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sehari setelah Gamsunoro berhasil keluar dari kawasan tersebut, sebuah kapal lain dilaporkan mengalami serangan di wilayah yang sama.

Perjalanan melintasi Selat Hormuz memakan waktu sekitar delapan jam. Empat jam di antaranya dilalui pada area yang dianggap paling kritis. Dalam situasi seperti itu, kewaspadaan menjadi harga mati.

Rizqi masih mengingat bagaimana sistem GPS kapal sempat mengalami gangguan atau jamming. Kondisi tersebut membuat seluruh tim navigasi harus bekerja ekstra untuk memastikan kapal tetap berada di jalur aman.

"Kami sempat merasa cemas. Dalam situasi seperti itu muncul pertanyaan, instruksi pihak mana yang harus diikuti. GPS juga mengalami gangguan. Bisa dibayangkan sangat beruntung bisa melewati semuanya dengan selamat," tuturnya.

Di daratan, keluarga menunggu kabar. Sementara di kantor pusat, manajemen PIS terus memantau perkembangan situasi dari waktu ke waktu.

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Surya Tri Harto, mengatakan keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama perusahaan selama konflik berlangsung.

"Sejak kapal memasuki kawasan Teluk, kami terus memantau kondisi seluruh awak. Keselamatan kru selalu menjadi prioritas utama kami, bahkan di atas muatan dan aktivitas operasional," katanya.

Bagi Surya, keberhasilan para awak kapal bukan sekadar pencapaian operasional. Ada pengorbanan dan dedikasi yang tidak terlihat di balik layar distribusi energi nasional.

"Bagi kami, kalian adalah pahlawan. Dalam kondisi normal saja pelaut harus menghadapi ombak, angin, dan lautan lepas. Di Selat Hormuz, risiko yang kalian hadapi jauh lebih besar," ujarnya.

Rasa syukur yang sama disampaikan Presiden Komisaris PIS, Anwar Saadi. Selama beberapa bulan terakhir, kata dia, perusa-

haan mengikuti perkembangan situasi dengan penuh kekhawatiran.

"Hari ini kami bersyukur dapat melihat kru Pertamina Pride dan Gamsunoro kembali dalam kondisi sehat dan tersenyum," katanya.

Kini kedua kapal telah meninggalkan kawasan Teluk dan bersiap menjalankan pelayaran berikutnya. MT Gamsunoro menjalani pembersihan lambung kapal untuk meningkatkan performa, sementara Pertamina Pride menyelesaikan pembersihan bawah lambung sebagai persiapan operasi selanjutnya.

Namun bagi Rizqi dan rekan-rekannya, perjalanan melintasi Selat Hormuz akan selalu menjadi bagian yang tak terlupakan dalam karier mereka.

Di tengah ketidakpastian dunia, mereka tetap menjalankan tugas. Menembus jalur pelayaran yang dibayangi konflik. Mengantar energi agar tetap mengalir ke negeri. Dan ketika akhirnya melihat perairan Indonesia di depan mata, mereka tahu satu hal: mereka telah pulang dengan selamat. (001/re)



KEBAKARAN - Ilustrasi peristiwa kebakaran di rumah penduduk. (Ist)

Rumah Hangus Terbakar, Jumiati Meninggal Dunia

PASBAR - SINGGALANG

Kebakaran menghancurkan sebuah rumah semi permanen di Jorong Limau Purut Timur, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Selasa (11/8) sekitar pukul 03.45 WIB. Dalam peristiwa tersebut, seorang perempuan bernama Jumiati (43) meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah yang terbakar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Pasaman Barat, Handoko Lubis, Selasa (11/8), membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut.

Menurutnya, petugas menerima laporan dan langsung melakukan penanganan terhadap kebakaran di lokasi kejadian.

Ia menjelaskan, rumah yang terbakar merupakan bangunan semi permanen milik Sukep. Rumah tersebut dihuni empat orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan dua orang anak. Saat kebakaran terjadi, seluruh penghuni berada di dalam rumah.

Menurut keterangan yang diperoleh, penghuni rumah sempat mengetahui adanya kebakaran dan berupaya menyelamatkan diri. Pemilik rumah bersama istri dan anak-anaknya berhasil keluar dari bangunan yang mulai dilalap api. Mereka juga sempat berupaya menyelamatkan sejumlah barang dari dalam rumah.

Namun, dalam situasi tersebut, Jumiati diduga kembali masuk ke dalam rumah untuk

mengambil sesuatu. Naas, saat berada di dalam, kobaran api semakin membesar sehingga korban terjebak di bagian belakang rumah dan tidak berhasil menyelamatkan diri.

Petugas kemudian menemukan korban setelah api berhasil dikendalikan. Jumiati dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa kebakaran tersebut. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi untuk proses penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan dugaan sementara, kebakaran diperkirakan bermula dari api kompor di bagian dapur. Saat kejadian, korban diduga tengah memasak. Api kemudian diduga membesar dan dengan cepat merambat ke bagian lain bangunan yang merupakan rumah semi permanen.

Selain menelan korban jiwa, kebakaran tersebut juga menghancurkan seluruh bangunan

rumah beserta berbagai barang milik penghuni. Sejumlah peralatan rumah tangga, pakaian, dokumen penting, serta barang-barang pribadi lainnya turut terbakar dalam peristiwa tersebut.

Akibat kebakaran, bangunan rumah mengalami kerusakan total dengan tingkat kerusakan diperkirakan mencapai 100 persen. Hingga kini, nilai kerugian materiil masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait.

Handoko mengimbau, agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas. Ia meminta warga memastikan kompor benar-benar dalam keadaan aman setelah digunakan serta memeriksa instalasi dan sambungan listrik secara berkala untuk mencegah terjadinya korsleting yang dapat memicu kebakaran. (Arafat)

Dua ASN Kemenag Menjadi Duta Sumbang di MTQ KORPRI VIII Tingkat Nasional

KOTO BARU - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Dr. H. Dedi Wandra, MA., didampingi Kepala Subbag TU, Busfi Eryon, MA., serta para Kepala Seksi melepas peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional utusan Provinsi Sumatera Barat, Selasa (11/8) di Ruang Kerja Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Solok.

Adapun dua duta kabupatren Solok yang menjadi duta Sumbang ke MTQ Korpri Nasional adalah Asep Rahma Putra, S.Ag (Cabang Dekorasi Putra) dan Dian Rizka Dewi, S.Th.I, M.Ag (Cabang Hifzil Putri).

"Ajang bergengsi antar-ASN skala nasional ini dijadwalkan berlangsung pada 23 hingga 30 Agustus 2026 di Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.," ujar Dr. H. Dedi Wandra, MA.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Solok, H. Dedi Wandra mengatakan bahwa MTQ KORPRI bukan sekadar ajang perlombaan meraih piala, melainkan momentum penting untuk mengukuhkan peran ASN Kemenag sebagai agen syiar Islam dan teladan nilai-nilai Al-Qur'an di birokrasi pemerintahan.

"Jadikan ajang MTQ Nasional ini sebagai wadah pengembangan potensi diri dan profesionalisme, sejalan dengan semangat Kemenag Berdampak serta peningkatan kualitas pengabdian ASN," harap Dedi Wandra.

MTQ KORPRI ini adalah panggung pembuktian integritas, bakat, dan religiusitas ASN karena itu tampilkan kemampuan terbaik dengan rasa percaya diri.

"Jaga kesehatan dan jaga kekompakan, berangkat dengan percaya diri, pulang dengan prestasi., Semoga perjalanan dan perjuangan MTQ KORPRI Sumbang berjalan lancar," tambah dedi Wandra.

Sementara Asep Rahma Putra menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian penuh serta pengarahan yang diberikan pimpinan.

"Terima kasih banyak atas segala arahan, dukungan, dan doa yang terus mengalir dari keluarga besar Kantor Kemenag Kabupaten Solok. Mohon doa restunya agar kami dapat tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk Sumatra Barat dan Kabupaten Solok," ucap Asep.

Keikutsertaan dua aparaturnya Kemenag Kabupaten Solok ini diharapkan tidak hanya mengukir prestasi di tingkat nasional, juga menjadi syiar Islam serta inspirasi bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat. **(504)**



DUTA MTQ KORPRI - Kakan Kemenag, Dedi Wandra diapit oleh duta MTQ KORPRI Nasional asal Kabupaten Solok serta Kasubag dan para Kepala Seksi. (Waitlem)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING
Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping - 26313 Telepon (0753) 20065, 20436
Email: C0269@corp.bri.co.id - Facsimile (0753) 20435

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta atas objek Hak Tanggungan berupa:

1.A DEBITUR: MUNAS Sebidang Tanah dengan Luas 1.307 M2 dan Bangunan, SHM No. 44 Atas nama Munas terletak di Jorong Kampang Tobek Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Nilai Limit : Rp 342.000.000,- Uang Jaminan : Rp. 192.800.000,-	1.B DEBITUR: MUNAS Sebidang Tanah dengan Luas 1.757 M2 dan Bangunan, SHM No. 124 Atas nama Munas terletak di Jorong Durian Panas Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Nilai Limit : Rp 116.800.000,- Uang Jaminan : Rp. 34.000.000,-

Syarat-syarat Lelang :
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang Internet, yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran.
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan mengisi serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
3. Waktu Penawaran dan Penetapan Pemenang.
Pelaksanaan lelang dengan jenis lelang melalui Internet (Open bidding) sebagai berikut :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak dimuat pada aplikasi lelang Internet sampai dengan:
Hari : Senin
Tanggal : 31 Agustus 2026
Waktu : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas akhir Penawaran : 31 Agustus 2026, Pukul 12.00 WIB (Sesuai waktu Server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Bukittinggi
Jl. M. Yamin Nomor 60, Bukittinggi
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang.
a. Peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dinyatakan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid.
c. Uang jaminan lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan.
5. Penawaran Lelang.
a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada alamat email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyertakan uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan limit.
6. Pelaksanaan Lelang.
a. Pemenang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan Bea Lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
c. Pengenaan BPHTB Atas perolehan tanah dan/bau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Untuk melihat barang dan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat lainnya dapat langsung menghubungi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, Telp. 0753-4729674 CP: Rici Eka Putra (0852 6343 9356), Amelia Meyenti (0813 6345 8194).
Lubuk Sikaping , 12 Agustus 2026
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING
Fahmy Tias Karviga
Pemimpin Cabang

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG Khatib SULAIMAN
Jalan Khatib Sulaiman No.65 Belanti Barat Kel Lolong Kec Padang Utara
Telepon : (0751) 443880 - 443749 Fac (0751) 443748
e-mail : C0669@bri.co.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Khatib Sulaiman dengan penunjukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan penjualan di muka umum/Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, terhadap barang jaminan berikut :
HERIAN FEBRIADY MARJON
A. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan SHM No. 5672 , Luas Tanah 120 M2 tercatat a.n MURUL HAIDA, Berlokasi di Komplek Jl. Sirsak II No. 105, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
Harga Limit Lelang : Rp. 200.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 60.000.000,-

Syarat-syarat Lelang :
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran.
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan mengisi serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut)
3. Waktu Pelaksanaan.
a. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:
Hari/Tanggal : Rabu /26 Agustus 2026
Batas Akhir Penawaran : 10.45 Waktu Server sesuai WIB
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang
Penetapan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang.
a. Peserta lelang diwajibkan menyertakan uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :
Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dinyatakan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran Lelang.
a. Penawaran harga lelang bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh Pejabat Lelang setelah peserta lelang menyertakan uang jaminan lelang;
b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dilakukan berkali-kali sesuai kelipatan yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan Lelang.
a. Pemenang Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan Bea Lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
c. Pemenang Lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41 Tahun 2023, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampung Bank BRI.
7. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.
8. Penguasaan Objek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor BKG Cabang Khatib Sulaiman pada setiap hari kerja, Telepon : Fatimah Hp. 08126725616 - Ferry, HP. 081277782267.
Padang, 12 Agustus 2026
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG Khatib SULAIMAN
Anang Sigit Harwanto
Pemimpin Cabang



RAKER
Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Koni Agam di Hotel The Axana Padang diadakan pada Senin hingga Selasa, 10-11 Agustus 2026. **(ist)**

Pemkab Agam Minta Pengcab Solid Bangun Olahraga

AGAM - SINGGALANG

Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Pemkab Agam Taslim memberikan apresiasi setinggi-tingginya dalam melaksanakan acara ini.

"Agenda ini memenuhi penyusunan pembinaan olahraga kedepan. Saya yakin dibawah kepemimpinan Edi Busti, atlet Agam bisa meraih prestasi nantinya," katanya.

Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Koni Agam di Hotel The Axana Padang diadakan pada Senin hingga Selasa, 10-11 Agustus 2026.

Acara ini turut dihadiri Kepala Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Supriyanto. Ke depan diharapkan berperan memperkuat pembinaan olahraga sejak dini. Kepada cabang

olahraga untuk melakukan pembinaan sejak dini dan harus bangga membesarkan tanah air atlet Agam bisa bersaing tingkat provinsi sampai nasional.

"Mari tingkatkan sinergi dan kolaborasi, karena tidak mungkin KONI Agam berjalan kalau tidak didukung oleh Pengcab yang ada," katanya.

Tentunya diminta seluruh Pengcab solid membangun olahraga dan meningkatkan profesionalisme dan tertib administrasi, transparan dan akuntabel karena olahraga berprestasi lahir dengan tata kelola yang sehat dan disiplin.

Direncanakan dalam waktu dekat digelar even lebih besar yakni Porprov, karenanya diminta KONI dan Pengcab lebih solid dan intensi siapkan ajang ini agar bisa meraih hasil terbaik.

Semoga Pemkab Agam terus memberikan dukungan sesuai kemampuan daerah, baik pengembangan sarana dan prasarana maupun lain.

Dalam prestasi dengan hal

tersebut, Ketua KONI Agam Edi Busti, mengajak seluruh cabang olahraga (Cabor) untuk berkomitmen melakukan pembinaan atlet dalam meningkatkan prestasinya.

"Juara atau prestasi ditentukan pada pembinaan atlet dan dilakukan dalam melahirkan atlet berprestasi karena Agam cukup disegani kabu paten/kota lainnya di Sumbar," katanya.

Agam selama ini menjuarai atau meraih medali emas di bidang olahraga beladiri, yang dibuktikan adanya atlet pencak silat Agam meraih medali emas tingkat internasional di Vietnam. Sebelumnya juga meraih medali emas di India, Brunei Darussalam dan Bahrain.

"Atlet ini murni atlet kita dari perguruan Tangan Mas di Lubuk Basung," katanya.

Selain itu atlet biliar asal Agam juga ada magang di Jakarta dan saat mengikuti kejuaraan, maka sulit dikanalakan lawannya.

Ke depan pihaknya yakin mereka akan meraih medali

emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada Oktober 2026.

Ditegaskannya, masih banyak lagi atlet asal Agam yang berprestasi dan masa depan olahraga Agam ditentukan orang Agam, masa depan olahraga Agam tergantung pada Pengcab.

Dalam mendukung program tersebut, KONI Agam mengalokasikan dana intensif khusus bagi atlet meraih medali emas tingkat nasional.

Tentunya untuk memotivasi atlet agar mereka tidak keluar dari Agam, karena akan mengikuti Porprov. Primaiddi, Tokoh Olahraga Senior Agam berharap lembaga olahraga tidak terintervensi oleh kepentingan, karena berdampak negatif untuk kemajuan prestasi olahraga kedepannya.

"Mari sama sama perkuat sikap sportivitas dalam olahraga dan biarkan maju, tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dari latihan menuju pertandingan meraih prestasi terbaik," katanya. **(210)**

PERKUAT UKHUWAH DAN LINGKUNGAN

Pemko Gelar Aksi Geber Masjid dan Tanam Pohon

Pariaman, Singgalang

Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pariaman dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah menggelar aksi sosial Gerakan Bersih-Bersih Masjid (Geber Masjid).

Kegiatan ini dihadiri Walikota Pariaman Yota Balad. Menjelang Kegiatan Geber Masjid, diawali apel yang dipimpin Walikota Pariaman di Masjid Raya Adam Sorin Kelurahan Jalan Baru, Senin (10/8).

Kegiatan aksi gotong royong dan bersih-bersih rumah ibadah tersebut juga dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah di Indonesia pada bulan Agustus 2026. Ini merupakan instruksi langsung dari Kementerian Agama Republik Indone-

sia.

Yota Balad menyebutkan Geber Masjid ini tidak hanya dilakukan untuk satu hari ini saja, akan tetapi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di Kota Pariaman dengan melibatkan OPD di lingkup Pemerintahan Kota Pariaman dan masyarakat sekitar.

Menurut Yota Balad, Geber Masjid ini bukan sekadar momentum menyambut kemerdekaan Republik Indonesia secara seremonial saja, tetapi bisa dilaksanakan secara rutin sebagai simpul penguat ukhuwah Islamiyah dan kepedulian kita terhadap kesucian tempat ibadah.

Di kesempatan tersebut Yota Balad juga menyampaikan kepada Kepala Kantor Ke me-

nag Kota Pariaman untuk bisa mencanangkan Masjid Pari-purna di masing-masing kecamatan sebagai contoh kepada daerah lain, sehingga Pemko bisa memberikan subsidi terhadap Masjid tersebut mulai dari Garin, Imam dan yang lainnya.

"Untuk 2027 kalau bisa Masjid Paripurna ini sudah bisa berjalan paling tidak satu masjid di tiap-tiap kecamatan, sehingga pembinaan keagamaan untuk masyarakat bisa kita subsidi melalui Pemerintah Kota Pariaman," tegasnya.

Apel pagi ditutup dengan penyerahan peralatan kebersihan dari Pemko Pariamoleh Yota Balad kepada Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman sekaligus dibarengi de-

ngan aksi tanam pohon oleh Yota Balad di halaman samping Masjid Raya Adam Sorin Kelurahan Jalan Baru sebagai simbol untuk memperkuat moderasi beragama, merawat kerukunan, dan menumbuhkan kepedulian lingkungan secara nyata.

Aksi Geber Masjid di mulai setelah melaksanakan apel pagi yang dimulai dengan kegiatan membersihkan lingkungan masjid, tempat wudhu, ruangan sholat dan setiap sudut area masjid. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan ASN Kemenag Kota Pariaman dan KUA Kecamatan Pariaman Tengah tetapi juga melibatkan pengurus masjid, perangkat kelurahan/desa dan masyarakat sekitar. **(503)**

Walikota Dorong Pengrajin Batik dan Rajutan Jadi UMKM Mandiri

PARIAMAN - Walikota Pariaman Yota Balad salurkan Bantuan Paket Usaha Batik dan Rajutan kepada 45 pengrajin di Balairung Rumah Dinas Walikota, Senin (10/8).

Ke-45 pengrajin lokal yang menerima bantuan tersebut merupakan peserta yang mengikuti pelatihan, diantaranya 20 orang peserta pelatihan batik cap dan 25 orang peserta pelatihan rajutan.

Walikota Pariaman, Yota Balad mengatakan bahwa hari ini kita menyerahkan bantuan paket usaha batik dan rajutan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan beberapa minggu yang lalu.

"Bantuan ini adalah implementasi dari Program Unggulan kami Wali Kota Pariaman bersama Wakil Wali Kota Pariaman yakni Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga. Kita berharap, bantuan usaha ini dapat berkesinambungan dan ada manfaatnya untuk menambah perekonomian keluarga," ungkapnya.

Ia menjelaskan Progul Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga ini, bertujuan memberdayakan setiap rumah tangga tidak hanya sekadar memproduksi barang, tetapi juga mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

"Kita menginginkan bantuan dan ilmu yang diberikan hari ini tidak hanya sebagai hobi, melainkan bertransformasi menjadi unit UMKM mandiri yang bernilai jual tinggi. Melalui kehadiran produk batik cap khas Kota Pariaman dan kerajinan rajutan yang modis, kita optimis dapat memperkaya portofolio oleh-oleh kreatif sekaligus memperkuat struktur industri rumahan lokal", ulasnya.

Ia menyebutkan Pemko Pariaman melalui Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman akan memberikan pendampingan kepada para penerima bantuan dalam memantau perkembangan usaha yang baik hingga manajemen usaha.

"Kepada penerima manfaat yang menerima bantuan usaha ini, agar tetap melaksanakan produktivitas dan insyaallah produktivitas yang ibu-ibu buat, Pemko Pariaman mendukung bagaimana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman bermanfaat dan bisa menambah perekonomian serta menghidupkan UMKM Kota Pariaman," pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, Deddy Kurnia Illahi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata penyelenggaraan Progul Walikota Pariaman dan Wakil Walikota Pariaman periode 2025-2030 yakni Satu Rumah Satu Industri Rumah Tangga.

"Bantuan sarana dan prasarana usaha ini diharapkan menjadi langkah awal untuk produktif dan kami Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman akan mendampingi dan melakukan pembinaan kepada peserta dan UMKM lainnya, sejauh mana pelatihan dan produk-produk yang dihasilkan dikembangkan, apa kekurangan dan kelebihanannya sehingga mereka bisa membuat dan menghasilkan produk yang berdaya jual tinggi dan menjadi kebanggaan Kota Pariaman," ucapnya. **(503)**

PT Menara Agung Tingkatkan Kualitas SDM AHASS

PADANG - Saat melakukan perawatan sepeda motor di AHASS, konsumen tentu ingin mendapatkan suku cadang dan oli yang sesuai dengan kebutuhan motornya.

Untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, PT Menara Agung kembali membekali Part Counter AHASS dengan pengetahuan dan kemampuan melalui Training Parts Management Knowledge (PMK).

Training yang digelar di Menara Agung Training Centre pada awal bulan ini bertujuan meningkatkan kemampuan Part Counter dalam memahami kebutuhan konsumen, sekaligus memastikan ketersediaan suku cadang dan oli di AHASS.

Dalam training tersebut, Part Counter mendapatkan pembekalan mengenai cara mengelola dan memantau persediaan suku cadang, mengatur kebutuhan stok, serta mengelola penyimpanan suku cadang di gudang.

Kemampuan tersebut penting agar konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kebutuhan suku cadang dan oli, serta mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan tepat saat melakukan perawatan sepeda motor di AHASS.

Part Manager PT Menara Agung, Ferry Susilo, mengatakan peningkatan kemampuan Part Counter menjadi salah satu langkah untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada konsumen.

"Melalui training ini, Part Counter menjadi lebih terampil dalam menganalisa stok serta memahami kebutuhan konsumen terhadap part dan oli di AHASS. Dengan begitu, kami berharap pelayanan kepada konsumen dapat semakin cepat dan tepat," ujar Ferry.

PT Menara Agung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di jaringan AHASS, tidak hanya dari sisi teknis perawatan sepeda motor, tetapi juga dari sisi pelayanan. Dengan Part Counter yang memiliki pengetahuan lebih baik, konsumen diharapkan semakin mudah mendapatkan suku cadang dan oli yang sesuai dengan kebutuhan sepeda motornya. **(109)**



SUASANA - Suasana PT Menara Agung kembali membekali Part Counter AHASS dengan pengetahuan dan kemampuan melalui Training Parts Management Knowledge (PMK). **(ist)**

PPUB UNP LAKSANAKAN INTERVENSI MULTIDISIPLIN

Cegah Stunting Melalui Revitalisasi Posyandu di Nagari Batagak

AGAM - Universitas Negeri Padang (UNP) melalui Program Pengabdian UNP Berdampak (PPUB) melaksanakan kegiatan 'Intervensi Multidisiplin Berbasis Evidence untuk Pencegahan Stunting Melalui Revitalisasi Posyandu pada Komunitas Pascabencana Nagari Batagak Berorientasi SDGs' di Nagari Batagak, Kabupaten Agam, pada Senin (10/8).

Kegiatan yang dilaksanakan di Poskesri Batagak dan TK Nurul Iti'had Jorong Batagak dengan melibatkan pemerintah nagari, kader posyandu, guru dan tenaga pendidik, ibu-ibu, serta tim dosen dan mahasiswa PPUB UNP.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Universitas Negeri Padang dalam mendukung upaya pencegahan stunting melalui pendekatan multidisiplin, penguatan kapasitas kader posyandu, edukasi gizi, serta pemberdayaan masyarakat. Program Pengabdian UNP Berdampak (PPUB) ini diketuai Dr. dr. Zuhrah Taufiq, M.Biomed, bersama tim dosen yang terdiri atas Agiti Kurniati Asrila, S.Psi., M.A., drh. Nur Rahmi, M.Si., dr. Putri Embun Pagi,



SUASANA - Suasana Program Pengabdian UNP Berdampak (PPUB) melaksanakan kegiatan 'Intervensi Multidisiplin Berbasis Evidence untuk Pencegahan Stunting Melalui Revitalisasi Posyandu pada Komunitas Pascabencana Nagari Batagak Berorientasi SDGs' di Nagari Batagak, Kab. Agam, pada Senin (10/8). **(ist)**

Sp.OG, dan drh. Fitria Susanti, M.Si.

Kegiatan ini didukung tim mahasiswa lintas program studi dan fakultas yang melibatkan bidang kedokteran, kedokteran hewan, dan psikologi, meliputi Navila Samaa Volasoo'hy, Salmi Nur Aulia, Devina Putri, Zahara Niatul Fadli, Ashila Nafi Tsabitha, Muhammad Luthfi Ghivary, Cindy Rachma Yuniza, dan Lucky Iqra Ilhamda.

Kegiatan dihadiri perwakilan Wali Nagari Batagak, Mardianis

berserta tim, Kepala TK Nurul Iti'had Ermitah, perwakilan kader posyandu Nagari Batagak, guru dan tenaga pendidik TK Nurul Iti'had, serta tim dosen dan mahasiswa PPUB UNP.

"Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara paralel di TK Nurul Iti'had Jorong Batagak dan Poskesri Batagak. Di TK Nurul Iti'had, anak-anak mendapatkan edukasi mengenai pengenalan makanan sehat dan tidak sehat. Edukasi diberikan secara interaktif dan

disesuaikan dengan usia anak agar mereka lebih mudah mengenali makanan yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan," ucap Dr. dr. Zuhrah Taufiq, M.Biomed.

Sementara itu, kegiatan di Poskesri Batagak difokuskan pada penguatan kapasitas kader posyandu serta edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting, pola asuh, pemilihan pangan hewani berkualitas, dan pemanfaatan Kit GizKa sebagai media edukasi.

Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah penyerahan Kit GizKa kepada perwakilan kader seluruh posyandu di Nagari Batagak. Kit GizKa terdiri atas tiga buku dan satu paket Emo Demo Games yang dapat dimanfaatkan kader sebagai media edukasi kepada masyarakat mengenai gizi, pola asuh, serta pencegahan stunting.

Sebelum memperoleh materi, peserta mengikuti pre-test untuk mengetahui tingkat pemahaman awal. Selanjutnya, Dr. dr. Zuhrah Taufiq, M.Biomed memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting serta

pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Materi kemudian dilanjutkan drh. Nur Rahmi, M.Si. yang memberikan edukasi mengenai pemilihan kualitas protein hewani. Peserta mendapatkan edukasi mengenai penyimpanan telur dengan memisahkan telur yang bersih dan kotor. Selain itu, diberikan pula edukasi mengenai cara memilih udang yang segar dan layak makan sebagai salah satu sumber protein hewani.

Setelah mendapatkan pelatihan dari tim PPUB, kader posyandu turut berperan dalam melanjutkan edukasi kepada ibu-ibu di posyandu. Kader menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan, khususnya dalam penggunaan Kit GizKa, serta edukasi mengenai pencegahan stunting, pola asuh, dan pemilihan pangan sumber protein hewani yang berkualitas.

Keterlibatan kader dalam edukasi kepada ibu-ibu menjadi bagian penting dari revitalisasi posyandu. Kader diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dari tim PPUB, tetapi juga mampu

meneruskan informasi dan keterampilan tersebut kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, edukasi yang diberikan dapat terus dilaksanakan di lingkungan posyandu setelah kegiatan pengabdian selesai.

Kegiatan juga melibatkan tim psikologi yang memberikan edukasi mengenai aspek psikologis dalam pengasuhan anak, khususnya bagi ibu dalam menghadapi anak dengan stunting. Materi yang diberikan mencakup penguatan responsif, pengelolaan stres dalam pengasuhan, serta pentingnya membangun interaksi positif antara orang tua dan anak. Edukasi ini bertujuan membantu orang tua memahami kebutuhan anak, merespons kebutuhan anak secara tepat, serta mengelola tekanan dan stres selama proses pengasuhan.

Melalui Program Pengabdian UNP Berdampak ini, tim pengabdian berharap intervensi multidisiplin yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader posyandu serta ibu-ibu dalam upaya pencegahan stunting. **(009)**



IPC TPK TG. PRIOK - Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu pengelola IPC TPK menghandel arus peti kemas baik ekspor maupun impor berada diurutkan ketiga sebesar 15,2%. (Yusman)

LONJAKAN TERTINGGI DI TELUK BAYUR

Arus Petikemas IPC TPK Tembus 2,17 Juta TEUs

JAKARTA - SINGGALANG

IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) anak usaha Pelindo, kembali mencatatkan tren kinerja operasional yang positif dengan membukukan pertumbuhan arus peti kemas secara kumulatif (year-on-year) sebesar 8% pada periode Januari hingga Juli 2026.

Pertumbuhan ini didorong oleh optimalisasi layanan dan efisiensi di seluruh wilayah kerja terminal. Volume arus peti kemas berhasil menembus

2.171.202 TEUs pada tujuh bulan pertama tahun 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2.009.185 TEUs.

"Capaian positif ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan IPC TPK dalam menjaga operational excellence serta memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa," ujar Daniel Setiawan, Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK kepada *Singgalang* di Jakarta, Selasa (11/8).

Menurutnya, pertumbuhan kinerja ini sejalan dengan peningkatan signifikan pada

performa bulan Juli 2026 yang tumbuh 13,7% (year-on-year) dengan pencapaian arus peti kemas sebesar 353.465 TEUs, dibandingkan dengan Juli 2025 sebesar 310.846 TEUs. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja optimal di sejumlah terminal pada Juli 2026.

"Lonjakan tertinggi dicatatkan oleh Terminal Teluk Bayur sebesar 30,8%, disusul Terminal Panjang sebesar 29,1%, Terminal Tanjung Priok sebesar 15,2%, serta Terminal Jambi yang naik 6%," ungkap Daniel.

Ia menyebutkan, melalui integrasi operasional dan efi-

siensi sistem kepelabuhanan di seluruh terminal, IPC TPK terus memastikan efisiensi layanan bagi pengguna jasa. Akselerasi pelayanan bongkar muat secara konsisten menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran rantai pasok nasional dan daya saing logistik Indonesia.

"Kami berharap pencapaian ini dapat terus menjadi pemicu semangat bagi seluruh tim IPC TPK untuk konsisten menjaga kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan tren kinerja positif," pungkas Daniel. **(602)**

Pedagang Toko Pertanian se-Sumbar Siapkan Asosiasi

Agam,Singgalang

Sejumlah pengusaha dan pedagang toko serta kios pertanian dari berbagai daerah di Sumatera Barat menggagas pembentukan asosiasi sebagai wadah memperkuat silaturahmi, komunikasi dan kerja sama antarpelaku usaha pertanian, di Green House Lezata, Kab. Agam, baru-baru ini.

Salah seorang penggagas, Hj. Eliana, mengatakan organisasi tersebut dirancang untuk menghimpun pedagang toko dan kios pertanian dalam satu wadah yang dapat memperkuat hubungan usaha sekaligus mendukung perkembangan sektor pertanian di Sumatera Barat.

"Hari ini kami akan merumuskan organisasi perkumpulan toko-toko dan kios pertanian se-Sumatera Barat. Tujuannya menjalin silaturahmi dan kerja sama yang lebih kuat, dengan kenyamanan dan keamanan bersama demi Sumatera Barat tercinta, terutama dalam bidang pertanian," ujarnya.

Menurut Eliana, sektor pertanian memiliki peran penting

terhadap perekonomian Sumatera Barat sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pedagang yang menyediakan sarana dan kebutuhan pertanian bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, selama ini telah terdapat sejumlah kumpulan yang melibatkan distributor dan pelaku usaha pertanian, tetapi belum terdapat organisasi resmi yang secara khusus menghimpun pemilik toko dan kios pertanian di Sumatera Barat.

"Belum ada lembaga resmi. Kalau dari persatuan rekan-rekan ada, tapi yang dari toko-toko belum pernah ada sama sekali. Baru-baru ini akan kita cetuskan," katanya.

Pembentukan asosiasi tersebut juga dilatarbelakangi kebutuhan pedagang terhadap informasi terbaru mengenai usaha pertanian serta komunikasi yang berkelanjutan antarpelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Eliana, wadah bersama diperlukan agar para pedagang dapat saling bertukar informasi, membangun

jaringan usaha dan mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas perdagangan.

Para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan pedagang toko dan kios pertanian dari berbagai daerah di Sumatera Barat.

Eliana mengatakan sejumlah persoalan masih dihadapi pedagang, mulai dari pemeriksaan terhadap barang dagangan hingga ketersediaan pupuk subsidi yang berdampak pada kebutuhan petani.

"Kendalanya kadang-kadang ada pemeriksaan seperti barang-barang expired, kemudian juga dari pupuk subsidi. Sekarang barang-barang subsidi susah didapatkan, kasihan petaninya," katanya.

Ia berharap pembentukan asosiasi dapat memberikan ruang bagi pedagang untuk membangun koordinasi yang lebih baik dalam menghadapi persoalan usaha sekaligus memperkuat hubungan antarpelaku perdagangan sarana pertanian.

Asosiasi tersebut nantinya diharapkan tidak hanya men-

jadi wadah silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana pertukaran informasi yang dapat membantu pedagang meningkatkan keberlangsungan dan perkembangan usaha.

Eliana mengatakan penguatan kerja sama antarpedagang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan organisasi tersebut sehingga kepentingan pelaku usaha toko dan kios pertanian dapat dikomunikasikan secara bersama.

Dalam pembentukan perkumpulan ini diawali dengan diskusi dan penguatan dari pakar hukum dan PWI Kota Bukittinggi dalam rangkaian kegiatan temu ramah dan silaturahmi.

Setelah diskusi disepakatilah pembentukan asosiasi tersebut dengan menunjuk 9 orang utusan kabupaten kota sebagai tim perumus yang diketuai oleh Vionandi, wakil Ridwan, sekretaris I Mega dan Bendahara Hj Eliana.

Tim perumus bertugas untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. **(203)**

Pemkab Agam Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

AGAM - Pemulihan pascabencana di Kabupaten Agam tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur, namun juga memperkuat perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Pemerintah Kabupaten Agam bersama Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani bersama Yayasan Pulih, di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8) lalu.

Bupati Agam dalam pertemuan itu mengatakan, Kabupaten Agam kini masih berada dalam tahapan pemulihan pascabencana. Sejumlah infrastruktur terdampak, seperti jalan dan jembatan, mulai menunjukkan perbaikan.

Namun, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan, termasuk pembangunan hunian tetap (huntap), persoalan ketersediaan lahan hingga pemulihan sektor pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

"Sekarang kita berada dalam masa pemulihan. Ada masyarakat yang masih berada di huntara, ada yang sudah menerima DTH dan ada pula



PERLINDUNGAN - Pemerintah Kabupaten Agam bersama Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Irjen Pol (Purn) Desy Andriani bersama Yayasan Pulih, di Rumah Dinas Bupati Agam, Senin (10/8). **(ist)**

yang masih berada di kawasan terdampak bencana," ujar Benni Warlis.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur. Kondisi sosial, psikologis dan kebutuhan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Karena itu, Pemkab Agam menyambut baik dukungan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih dalam memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Bupati menilai nilai-nilai

lokal dan kearifan masyarakat Agam menjadi modal penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui konsep "Bangkik dari Surau", yang menempatkan surau bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pendidikan, pembinaan karakter dan penguatan kehidupan sosial.

"Dengan bencana ini, kami sangat mendukung upaya pemulihan yang dilakukan bersama, dengan melibatkan tiga tali sapolin, yaitu ninik mamak, alim ulama dan cadiak

pandai, serta bundo kanduang sebagai ibu bagi masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan seluruh unsur masyarakat tersebut penting untuk membangun ketahanan sosial sekaligus memastikan pemulihan pascabencana berjalan secara menyeluruh.

Sementara itu, Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Irjen Pol (Purn) Desy Andriani mengapresiasi Bupati Agam yang telah memberikan ruang untuk membahas langkah-langkah pemulihan pascabencana.

Menurutnya, setiap peristiwa bencana dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem perlindungan masyarakat.

Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Kemen PPPA turut mengambil peran pada aspek sosial dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

"Dilihat dari timeline, September sampai akhir Desember harus tuntas dalam konteks PPRT," ujarnya.

Desy mengatakan, Kemen PPPA juga menggandeng mitra pembangunan, salah satunya Yayasan Pulih untuk mendukung pelaksanaan program di

Kakan Kemenag Agam Terima

Kunjungan Ketua STAI Lima Puluh Kota

LUBUK BASUNG - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Dr. H. Rinalfi, S.Ag., S.H., M.M., didampingi Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPP), H. Yunaldi, S.Ag. M.Pd menerima kunjungan Ketua STAI Lima Puluh Kota Dr. Nurfitriah Dewi, S.Hum. M.A dan tim di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, termasuk informasi beasiswa bagi lulusan madrasah dan pondok pesantren. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan peluang melanjutkan pendidikan tinggi bagi lulusan madrasah dan pondok pesantren.

Selain sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kerja sama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam dan STAI Lima Puluh Kota.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung akses pendidikan tinggi keagamaan, khususnya bagi lulusan madrasah dan pondok pesantren di Kabupaten Agam.**(210)**

ETLE HUB Sistem Digital Terintegrasi

Dukung Implementasi Zero ODOL 2027

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan menyatakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE HUB merupakan sistem digital terintegrasi yang dikembangkan untuk menghubungkan berbagai sumber data dalam mendukung implementasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027.

"ETLE HUB bukan sekadar penggunaan kamera untuk menangkap pelanggaran. Sistem ini kami bangun untuk mengintegrasikan pengawasan kendaraan angkutan barang berbasis data, mulai dari identitas dan data teknis kendaraan, hasil penimbangan, uji berkala, hingga perizinan angkutan. Dengan integrasi tersebut, pengawasan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terukur dan akuntabel," ujar Dirjen Aan kepada *Singgalang* di Jakarta, Selasa (11/8).

Mengutip Kabag Hukum, Humas dan Umum Ditjen Hubdat, Mogot Bukara, ETLE HUB dibangun sebagai sebuah integrated enforcement ecosystem yang menghubungkan berbagai perangkat dan sumber data di sektor transportasi darat. "Peluncuran Sistem Penegakan Hukum Melalui Alat Bukti Rekaman Elektronik Pelanggaran Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ETLE HUB) yang diselenggarakan hari Senin (10/8) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

"Yang kita lakukan adalah mendigitalisasi proses yang selama ini telah berjalan secara manual. Bedanya, dengan ETLE HUB prosesnya menjadi lebih cepat, konsisten, transparan, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem lainnya," jelas Dirjen Aan.

Ia menyebutkan, pihaknya ingin mengubah pola pengawasan kendaraan Odol yang selama ini sangat bergantung pada pemeriksaan fisik dan keberadaan petugas di lapangan menjadi pengawasan yang lebih sistematis, berbasis data, dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Kita harus melihat realitas bahwa jumlah kendaraan angkutan barang yang beroperasi sangat besar, sementara jumlah petugas dan titik pemeriksaan tentu memiliki keterbatasan. Dengan digitalisasi, kapasitas dan jangkauan pengawasan dapat diperluas tanpa seluruhnya bergantung pada penambahan personel," tukasnya.

Kalau dijabarkan, kata Dirjen Aan, saat ini ETLE HUB memiliki 51 titik pantau di antaranya 26 titik pantau di lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan 25 titik pantau di beberapa ruas jalan tol. Pengembangan akan terus dilakukan hingga nantinya terdapat 63 titik pantau di UPPKB dan 15 titik pantau dengan teknologi Weigh In Motion (WIM).

Bagi kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran lebih muat diberikan peringatan sebagai wujud sosialisasi menuju Zero Odol 2027 dan bagi yang melakukan pelanggaran dokumen berupa pemenuhan laik jalan dilakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun untuk saat ini, lanjut Dirjen Aan, ETLE HUB akan difokuskan terlebih dulu pada angkutan barang, baik angkutan barang umum maupun angkutan barang khusus, utamanya keterkaitan dengan kendaraan ODOL karena menyangkut keselamatan transportasi, perlindungan infrastruktur jalan, dan tata kelola logistik nasional.

"Kendati demikian, kami akan terus melakukan pengembangan sistem sehingga ke depan cakupan pengawasan akan diperluas juga kepada angkutan orang khususnya bus," tuturnya seraya menyatakan untuk angkutan orang, sistem dapat dikembangkan untuk memperkuat pengawasan bus terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, uji berkala, perizinan, serta ketentuan operasional angkutan orang.

"ETLE HUB bukanlah sekadar aplikasi atau kamera baru, tetapi transformasi proses pengawasan yang selama ini sudah dilakukan Kemenhub. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan bukan untuk memperbanyak penilangan," pungkas Dirjen Aan Suhanan. **(602)**

lapangan.

Ia berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Agam dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperlancar pelaksanaan program, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan, anak, kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Livia Istania DF Iskandar mengatakan, pihaknya akan turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam situasi bencana, pascakonflik maupun kondisi normal. "Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu hal yang kami diskusikan, karena kekerasan dapat terjadi dalam konteks bencana maupun pascabencana," jelasnya.

Saat ini Yayasan Pulih melaksanakan kegiatan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Agam, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan melibatkan tenaga pendukung di lapangan.

Sebelumnya, selama kurang lebih enam bulan, Yayasan Pulih juga melaksanakan program pemulihan psikososial

bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Selatan.

Dukungan tersebut kini dilanjutkan di Kabupaten Agam sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Mengulas hal itu, Bupati Agam menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Kemen PPPA dan Yayasan Pulih, yang memilih Kabupaten Agam sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program pemulihan.

Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam memulihkan masyarakat secara utuh, mulai dari aspek fisik, sosial dan psikologis hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.

Audiensi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Agam untuk memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak, termasuk dalam situasi darurat dan pascabencana.

Sinergi antara pemerintah, kementerian/lembaga, mitra pembangunan dan unsur masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemulihan yang inklusif, aman, berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Agam.**(210)**

Mendagri Siapkan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan skema yang pertama adalah meminta Pemda melakukan efisiensi

Bapenda Sumbar

282.345.200. Namun, hingga saat ini realisasi pembayaran yang diterima baru sebesar Rp179.707.500. Artinya, masih terdapat sisa pajak terutang sebesar Rp114.102.637.700 yang harus diselesaikan oleh para wajib pajak.

Peta sebaran tunggakan pajak air permukaan ini tersebar di enam wilayah kabupaten di Sumatera Barat, dengan angka tertinggi berada di Kabupaten Pasaman Barat.

Berikut adalah rincian data sebaran tunggakan Pajak Air Permukaan (PAP) Sektor Perkebunan di Sumatera Barat:

WILAYAH	PAJAK TERUTANG	TERBAYARKAN	SISA PAJAK TERUTANG
Pasaman Barat	Rp 77.950.744.600	Rp 178.932.300	Rp 77.771.812.300
Dharmasraya	Rp 13.067.800.300	Rp 0	Rp 13.067.800.300
Pesisir Selatan	Rp 11.882.436.100	Rp 0	Rp 11.882.436.100
Agam	Rp 7.316.448.100	Rp 0	Rp 7.316.448.100
Padang Aro			
Solok Selatan)	Rp 3.567.959.700	Rp 0	Rp 3.567.959.700
Sijunjung	Rp 496.956.400	Rp 775.200	Rp 496.181.200
TOTAL	Rp 114.282.345.200	Rp 179.707.500	Rp 114.102.637.700

Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Barat, Al Amin, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa penagihan ini bukan semata-mata demi memburu target penerimaan daerah, melainkan bentuk penegakan kepatuhan dan keadilan perpajakan. "Penagihan kami lakukan sesuai prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang masih memiliki kewajiban harus menyelesaikan pajak terutangnya. Pemerintah daerah akan terus melakukan langkah-langkah penagihan secara tertib, terukur, dan sesuai kewenangan," tegas Al Amin, dalam keterangan persnya, Selasa (11/8) di Kantor Bapenda Sumbar.

Dijelaskannya, proses pemungutan dan penagihan pajak daerah ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memuat aturan penagihan, pemeriksaan, keberatan, hingga tata cara

anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami

pengelolaan piutang pajak.

"Bapenda kini tengah gencar melakukan pemutakhiran data, verifikasi kewajiban pajak, pendekatan persuasif, hingga tindakan administrasi. Namun, Al Amin memperingatkan bahwa bagi wajib pajak yang tetap membandel setelah dilayangkan Surat Teguran, Bapenda tidak ragu untuk melangkah ke tindakan tegas," terangnya.

Dalam hali ini prosedur yang akan ditempuh meliputi, penerbitan surat teguran atau pembe-

ritahuan awal.
Pelanjutan proses ke tahapan Surat Paksa.Tindakan ekstrem berupa penyitaan aset sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Demi Keadilan Pajak

Al Amin, mengatakan langkah tegas yang dilakukan sebagai bagian dari strategi Bapenda Sumbar untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, langkah ini diambil guna menjaga prinsip kesetaraan agar para pelaku usaha yang telah taat pajak tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang abai terhadap kewajibannya.

Ke depan, Bapenda Sumbar akan memperkuat koordinasi dengan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam hal pendataan, pengawasan, hingga pemeriksaan di lapangan. Optimalisasi sektor pajak air permukaan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih nyata dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Sumatera Barat. **(adv)**

laboratorium hingga industri.

Perlu Bercermin

Di sisi lain, para peneliti dan BRIN juga perlu melihat fenomena ini sebagai bahan evaluasi. Jika publik lebih mudah mengingat sepatu karet daripada teknologi material yang berada di belakangnya, persoalannya mungkin bukan semata-mata terletak pada publik.

Komunikasi sains kita belum selalu mampu menjelaskan sebuah inovasi dengan bahasa sederhana: masalah apa yang ingin diselesaikan, apa kebaruannya, siapa yang membutuhkan teknologi tersebut, berapa nilai ekonominya, dan apa dampaknya apabila diterapkan secara luas.

Peneliti sering terbiasa berbicara menggunakan istilah teknis. Di laboratorium, hal tersebut tidak menjadi persoalan. Namun, ketika berhadapan dengan publik, teknologi harus diterjemahkan menjadi manfaat yang nyata.

Kami para peneliti juga tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu teknologi "inovatif" atau "canggih". Publik berhak mengetahui bukti manfaatnya: apakah teknologi tersebut lebih murah, lebih cepat, lebih akurat, mengurangi impor, memanfaatkan bahan lokal, menghemat energi, mengurangi limbah, atau membuka peluang industri baru? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang justru perlu terus diajukan.

Kritik yang Membantu Riset Bertumbuh

Pertemuan para peneliti BRIN dengan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet pada Kamis sore, 6 Agustus 2026 tersebut memberikan satu pesan penting: sains dan teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi dan kemandirian bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya penguasaan teknologi. BRIN sendiri mulai lebih kuat mendorong hilirisasi, peningkatan produktivitas UMKM, penguatan industri nasional, serta co-development teknologi strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, genomik, teknologi kuantum, nuklir, dan kedirgantaraan.

Tentu BRIN tidak dapat mengerjakanannya sendiri. Dibutuhkan pendanaan dari pemerintah dan swasta, industri yang berani mengambil risiko untuk mengadopsi teknologi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pengguna akhir.

Kritik publik juga merupakan bagian penting dari ekosistem tersebut. Publik tidak harus mengagumi setiap hasil penelitian BRIN. Bahkan, kritik diperlukan karena sebagian besar kegiatan penelitian menggunakan sumber daya publik. Namun, kritik yang sehat sebaiknya membawa kita berdiskusi lebih jauh daripada sekadar menertawakan bentuk produk yang terlihat di meja pameran.

Kita perlu bertanya: teknologi apa yang dikuasai? Masalah apa yang diselesaikan? Ketergantungan apa yang dapat dikurangi? Industri apa yang bisa tumbuh? Dan siapa yang akhirnya memperoleh manfaat?

Sepatu tetaplah sepatu. Genteng tetaplah genteng. Keripik tetaplah keripik. Namun, di balik sebuah produk yang tampak sederhana dapat tersimpan teknologi material, rekayasa manufaktur, pemanfaatan limbah, varietas unggul, rantai pasok, serta pengetahuan yang dibangun melalui penelitian bertahun-tahun. Pada titik itulah seharusnya sebuah riset mulai dinilai.

(Adnan; Peneliti Ahli Madya bidang Teknologi Pascapanen dan Spektroskopi di Pusat Riset Teknologi Manufaktur Peralatan, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, BRIN. Dikutip dari detikcom)

kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). "Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (11/8).

Tito menjelaskan persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

"Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya," tutur Tito sebagaimana dikutip detikcom.

Pencairan Dana Rp 18,9 T

Pihaknya juga melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada

Kemenhaj Sumbar

perlindungan sebelum dan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumbar, M. Rifki, menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan praktik penyelenggaraan umrah tanpa legalitas beroperasi di Sumbar. Travel yang terbukti menjalankan kegiatan tanpa izin, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan setelah Tim Bina dan Pengendalian Kanwil Kemenhaj Sumbar melakukan pemantauan dan klarifikasi terhadap sejumlah penyelenggara perjalanan umrah di daerah, di antaranya di Kabupaten Solok dan Kota Padang Panjang.

"Di Kabupaten Solok, tim menemukan adanya penggunaan nama dan identitas PPIU yang telah memiliki izin oleh pihak travel yang belum mengantongi izin PPIU. Penggunaan identitas tersebut menjadi perhatian karena dapat menimbulkan persepsi bahwa penyelenggara telah memiliki legalitas sebagai PPIU," katanya seperti dalam rilis yang diterima, Selasa (11/8).

Ia mengatakan, dalam proses klarifikasi, pihak yang diperiksa menyampaikan bahwa tidak ada niat untuk memanfaatkan identitas pihak lain. Identitas yang sebelumnya terpasang kemudian dilepas dan diganti dengan identitas milik sendiri.

Rifki menegaskan, legalitas penyelenggara merupakan hal mendasar yang harus dipastikan sebelum sebuah travel menjalankan kegiatan perjalanan ibadah umrah. Pihak yang belum memiliki izin PPIU tidak semestinya menjalankan fungsi sebagai penyelenggara PPIU, dengan menggunakan identitas maupun legalitas pihak lain.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga bagian dari upaya melindungi jemaah. Sebab, ketika terjadi persoalan dalam perjalanan, status dan tanggung jawab pihak yang membe-rangkatkan jemaah harus jelas.

"Kita ingin memastikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah menda-patkan pelayanan dari penyelenggara yang jelas legalitasnya dan dapat mempertanggungja-wabkan pelayanan kepada jemaah," ujarnya.

Pengawasan tersebut sangat relevan dengan terbitnya Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan

Ibu dan Nenek

Ganaro di Jorong Situak Timur, Nagari Situak, Kecamatan Lembah Melintang, Selasa (11/8) sekitar pukul 10.00 WIB.

Peristiwa tersebut mulai diketahui setelah salah seorang anak korban lainnya mendatangi rumah pada Selasa (11/8) sekitar pukul 06.00 WIB. Saat berada di lokasi, ia menemukan kedua korban dalam kondisi telah meninggal dunia. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, polisi memperoleh informasi yang mengarah kepada H sebagai orang yang diduga melakukan penganiayaan. Terduga pelaku diketahui memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan kedua korban, yakni sebagai anak kandung Hapni sekaligus cucu dari Rohma. Petugas kemudian melakukan pengejaran untuk memastikan keberadaan H.

Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah menga-takan, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh dari terduga pelaku, aksi tersebut diduga bermula ketika H sedang berada di rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah kedua korban. Dalam keterangannya kepada petugas, H mengaku bermimpi didatangi seorang lelaki yang menyuruhnya menganiaya kedua korban.

"Menurut pengakuan terduga pelaku, dalam mimpi tersebut dirinya merasa akan dianiaya apabila tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh lelaki tersebut," ujarnya.

Meski demikian, polisi masih mendalami kondisi dan motif sebenarnya di balik tindakan yang dilakukan H, termasuk mencermati seluruh keterangan yang diperoleh selama proses penyidikan.

Kronologi

Diketahui, sekitar pukul 18.45 WIB, H berjalan menuju rumah kedua korban. Terduga pelaku masuk melalui pintu depan dan melihat Hapni serta Rohma yang disebut baru selesai melaksanakan salat Magrib. Setelah berada di dalam rumah, H kemudian menuju bagian dapur

Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp 8 triliun berasal dari tambahan DAU.

"Jadi totalnya hampir Rp 19 triliun, Rp 18,9 sekian, Rp 19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing," terang Tito.

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendid kan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan kan di daerah yang mengalami kekurangan guru se hingga distribusi tenaga pendidik lebih merata. **(*)**

Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Keagamaan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan di Pa dang Panjang menyusul insiden seorang jemaah umrah yang sempat diamankan aparat keama nan Arab Saudi saat mengantre makanan gratis.

Tim Bina dan Pengendalian Kemenhaj Sumbar mendatangi kantor travel untuk melakukan klarifikasi, termasuk terkait legalitas, pembekalan manasik, pendampingan jemaah, serta penanganan persoalan yang terjadi selama perjalanan.

Dalam kasus tersebut, pihak travel telah melakukan pendampingan, mengurus proses pembebasan hingga memastikan jemaah kembali dengan selamat. Meski demikian, Kemenhaj Sumbar tetap memberikan evaluasi agar pembekalan kepada jemaah, khususnya terkait aturan dan tata tertib di Arab Saudi, semakin diperkuat.

Rifki mengingatkan seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar tidak hanya ber orientasi pada keberangkatan jemaah, tetapi juga memastikan mereka mendapatkan pembekalan yang memadai sebelum berada di Tanah Suci. "Jemaah harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, termasuk memahami aturan dan tata tertib di Arab Saudi. Ini penting agar mereka dapat men jalankan ibadah dengan aman dan tidak meng hadapi persoalan akibat ketidaktahan," katanya.

Di sisi lain, Kemenhaj Sumbar mengimbau masyarakat agar lebih selektif sebelum memilih travel umrah. Calon jemaah diminta memastikan legalitas penyelenggara, memahami pihak yang bertanggung jawab atas perjalanan, serta tidak mudah tergiur tawaran paket yang tidak jelas.

Pengawasan terhadap travel umrah, kata Rifki, akan terus diperkuat. Kemenhaj Sumbar juga mengingatkan penyelenggara yang belum memiliki izin agar tidak menjalankan kegiatan PPIU maupun menggunakan identitas PPIU lain untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat dirugikan. Kami akan terus melakukan pengawasan dan meng ambil langkah sesuai ketentuan terhadap travel yang tidak memenuhi persyaratan," tegasnya.

Melalui pengawasan tersebut, Kemenhaj Sumbar berharap ekosistem perjalanan ibadah umrah di Sumbar semakin tertib, transparan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin memenuhi panggilan ibadah ke Tanah Suci. **(106)**

dan mengambil sebatang kayu yang berada di atas tungku atau tempat pembakaran.

Dengan menggunakan kayu tersebut, H diduga mendatangi kedua korban dan memukul bagian kepala Hapni dari arah belakang sebanyak tiga kali. Rohma yang melihat kejadian tersebut kemudian disebut berusaha memeluk Hapni. Namun, tindakan tersebut tidak meng-hentikan aksi H. Terduga pelaku kemudian diduga memukul bagian kepala Rohma sebanyak tiga kali hingga kedua korban terjatuh dan tidak berdaya.

Setelah kedua korban tergeletak, H mening-galkan rumah dan berjalan menuju kediaman kerabatnya di Jorong Situak.

Sementara itu, kondisi kedua korban baru diketahui pada Selasa pagi sekitar pukul 06.00 WIB oleh salah seorang anak korban. Penemuan tersebut sontak membuat warga sekitar geger dan selanjutnya kasus itu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan.

Mendapat laporan, Tim Opsnal Satreskrim Polres Pasaman Barat langsung mendatangi TKP di Jorong Sungai Tanang, Nagari Kasik Putih, Kecamatan Sungai Aur. Setelah melakukan olah TKP dan penyelidikan, petugas memperoleh informasi bahwa H berada di rumah kerabatnya di Jorong Situak Timur, Nagari Situak, Kecamatan Lembah Melintang. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan H tanpa perlawanan sekitar tiga jam setelah penyelidikan mengarah kepada keberadaannya.

Dari hasil pemeriksaan awal, H mengaku telah melakukan pemukulan terhadap ibu kandung dan neneknya. Polisi turut mengaman-kan satu batang kayu yang diduga digunakan dalam aksi tersebut sebagai barang bukti. Kedua korban selanjutnya dibawa ke RSUD Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan dan visum guna kepentingan penyidikan.

Saat ini, H bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa tersebut, termasuk memastikan kondisi serta latar belakang terduga pelaku sebelum dan saat kejadian. Polisi juga masih melengkapi alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. **(arafat)**



SOSIALISASI PERDA OLEH WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

Evi Yandri Ajak Warga Rangkul Pecandu Narkoba untuk Direhabilitasi

PADANG - SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa masyarakat perlu mengubah pola pikir negatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, para pecandu bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang bisa sembuh, kembali berkontribusi, bahkan berprestasi.



Kilangan, dan Puskesmas Lubuk Buaya. Selain itu, layanan juga tersedia di RSUP Dr. M. Djamil dan RS Jiwa Prof. HB. Saanin.

"Ada program restorative justice yang menggratiskan biaya rehabilitasi pasien penyalahgunaan narkoba. Jadi, jangan ragu untuk mengusahakan kesembuhan mereka," kata Fradila.

Upaya pemulihan ini juga didukung oleh Yayasan Pelita Jiwa Insani (YPJI) yang didirikan oleh Evi Yandri sejak tahun 2014. Kepala YPJI, Syafrizal, mengungkapkan bahwa banyak mantan pasiennya yang kini sukses di masyarakat setelah dinyatakan sembuh.

"Ada pasien kami yang sudah sembuh kini lulus menjadi anggota TNI Angkatan Darat, bekerja di PT KAI, hingga menjadi PNS. Ini bukti nyata bahwa mereka bisa pulih dan berprestasi," ungkap Syafrizal, yang dalam acara itu juga menghadirkan empat pasien rehabilitasi untuk berbagi pengalaman sebagai pembelajaran bagi peserta.(*)

"Mereka bisa direhabilitasi dan sembuh. Kecuali jika mereka ikut mengedarkan narkoba, itu urusan berbeda dan harus ditindak secara hukum," ujar Evi Yandri saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika,

dan Zat Adiktif Lainnya di Gedung Rohanna Kudus, Kompleks GOR Agus Salim, Padang, Minggu sore (9/8/2026).

Evi menekankan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba adalah korban. Oleh karena itu, di kalangan penggiat antinarkoba, mereka lebih tepat disebut sebagai pasien.

"Mereka harus dirangkul, diajak

rehabilitasi, dan disembuhkan. Daripada mereka terciduk aparat hukum, sebaiknya lebih dulu dibawa untuk rehabilitasi," paparnya.

Ia menambahkan, rehabilitasi merupakan bagian krusial dari upaya pencegahan. Dengan menyembuhkan para pengguna, masyarakat secara tidak langsung ikut menghambat perluasan peredaran

narkoba. Evi menyadari, berbagai upaya pemerintah dan aparat penegak hukum di Sumbar selama ini belum memberikan hasil signifikan tanpa peran aktif masyarakat.

"Sumbar bukan lagi sekadar daerah perlintasan, melainkan sudah menjadi tempat peredaran. Karena itu, saya konsisten menyosialisasikan perda antinarkoba

ini karena ancamannya sudah sangat masif," tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, perwakilan Dinas Kesehatan Sumbar, Fradila, turut memaparkan fasilitas medis yang tersedia. Untuk Kota Padang, masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi di Puskesmas Andalas, Puskesmas Lubuk Begalung, Puskesmas Lubuk

SERBANEKA



BIMTEK - Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus di Kota Padang, Senin (10/8). (ist)

BIMTEK KOMPETENSI GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Ketua DPRD Sumbar Dorong Pendidik jadi Inspirator Siswa

PADANG - SINGGALANG

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya penguasaan keterampilan bagi para pendidik. Hal tersebut krusial dalam menghadapi arus perubahan teknologi dan informasi yang kian cepat.

Pendidikan Khusus di Kota Padang, Senin (10/8).

Langkah ini sejalan dengan komitmen DPRD Sumbar dalam memperkuat kualitas kepemimpinan, manajemen, serta mutu pendidikan di ranah Minang.

Dalam arahannya, Muhidi mendorong tenaga pendidik (tendik) agar tidak sekadar mentransfer ilmu secara konvensional di kelas.

Pendidik masa kini dituntut mampu bertransformasi menjadi sumber inspirasi, fasilitator yang andal, serta motivator bagi para peserta didik.

"Jika ibu-ibu datang ke sekolah hanya untuk mengajar, maka kualitas peserta didik pasti berada di bawah kualitas ibu-ibu sekalian. Itu sudah

pasti, karena belum tentu apa yang diajarkan dapat diserap secara baik oleh siswa," ujar Muhidi di hadapan peserta.

Oleh karena itu, ia meminta guru mengoptimalkan fungsi-fungsi edukasi modern lainnya.

"Gunakanlah fungsi yang lain, yaitu sebagai inspirator, fasilitator, dan motivator. Bentuklah karakter siswa sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran, serta kemandirian," imbuhnya.

Muhidi juga menambahkan bahwa guru harus mampu bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) yang membentuk karakter kuat pada generasi muda.

Di tengah tantangan era digital, peran guru sekolah luar biasa (SLB) menjadi fondasi

utama dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri untuk mendukung visi jangka panjang Indonesia.

Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus ini digelar secara berkelanjutan guna mendorong kompetensi profesional para guru SLB.

Selain itu, program ini bertujuan memperkuat implementasi sistem pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan spesifik peserta didik berkebutuhan khusus.

Agenda strategis ini diikuti oleh puluhan Guru SLB yang berasal dari tiga wilayah kerja, yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. (401)

Pemko Padang Serahkan Bantuan untuk Sejumlah Kelompok Usaha

PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran menyerahkan bantuan kepada sejumlah kelompok usaha di sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu.

Fadly Amran baru-baru ini menyampaikan, rangkaian peringatan HJK juga digunakan untuk menjadi ajang charity, yang hasilnya diserahkan seluruhnya kepada masyarakat terdampak banjir.

Fadly Amran menyebutkan, bantuan di bidang perikanan dan pangan yang diberikan Pemerintah Kota Padang ini sebesar Rp8 miliar. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada 2025 lalu.

Fadly Amran mengapresiasi Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang telah menyiapkan berbagai bantuan bagi pelaku usaha di sektor perikanan dan pangan.

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program unggulan Padang Melayani.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi merincikan, bantuan yang disalurkan diberikan dalam berbagai sektor, termasuk untuk mendukung aktivitas nelayan dan usaha kelautan.

Dijelaskannya, pada bidang perikanan tangkap, Pemko Padang menyalurkan 19 unit perahu fiber, 724 set jaring monofilamen, dan 19 unit mesin tempel 15 PK.

Sementara itu, pada bidang perikanan budidaya, bantuan yang diberikan berupa 30 ekor calon induk lele dan 800 kilogram pakan ikan.

Untuk mendukung pengolahan hasil perikanan, diserahkan pula 4 unit chest freezer, 1 unit vacuum sealer, 1 unit kompor gas, dan 1 unit kuili besar.

Di bidang konsumsi dan keamanan pangan, bantuan diberikan dalam dua bentuk. Pertama, berupa sarana Kebun Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang terdiri dari tanah humus, pupuk kompos, polybag, serta aneka benih sayuran seperti bayam, cabai, tomat, kangkung, dan lainnya.

Kedua, berupa bantuan alat pengolahan pangan seperti blender, mesin press baglog, freezer box, kulkas dua pintu, dan mesin press sealer. (103)



TERIMA BANTUAN - Sejumlah kelompok usaha di sektor perikanan dan pangan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu terima bantuan dari Pemko Padang. (i.e.syawaldi)



FASHION - Penutupan Rangkaian Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 sekaligus Padang Fashion Summit (PFS). (j.e. syawaldi)

HJK Ke-357 Padang Ditutup Terjadi Perputaran Uang Rp46,5 Miliar

PADANG - SINGGALANG

Walikota Fadly Amran secara resmi menutup rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 sekaligus Padang Fashion Summit (PFS), di ZHM Premiere Hotel, Senin malam (10/8).

Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan HJK Padang yang berlangsung sejak 6 Agustus 2026, dengan mengu-

sung tema Taste of Padang Experience : Road to Gastronomy City.

Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak yang telah berkontribusi dalam sukseskan rangkaian HJK Padang tahun ini. Menurutnya, berbagai kegiatan yang digelar berlangsung sukses dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang terus mendorong terwujudnya Padang sebagai Kota Kreatif UNESCO. Untuk itu, berbagai subsektor ekonomi kreatif seperti gastrono-

mi, desain, seni pertunjukan, dan fashion perlu terus dikembangkan.

"Dalam lima hari ini, perputaran uang di Padang mencapai Rp46,5 miliar. Ini menunjukkan event yang kita laksanakan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Padang," ujar Wako.

Fadly Amran juga menyebutkan berbagai event yang digelar dalam rangka HJK ke-357 bertujuan mendatangkan lebih banyak orang ke Padang. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah kunjungan ke Padang meningkat dari 4,3 juta pada 2024, menjadi 5,3

juta kunjungan pada 2025.

Ketua Dekranasda Padang Ny. Dian Fadly Amran mengatakan Padang Fashion Summit bukan sekadar ajang peragaan busana, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kolaborasi sekaligus mempercepat perkembangan industri fashion lokal.

Istri Walikota itu menyebutkan, Padang Fashion Summit tahun ini turut menghadirkan desainer dari luar negeri, diantaranya tiga desainer asal Australia dan satu desainer dari Malaysia yang berpartisipasi dalam fashion show dengan memperagakan karya-karya mereka. (103)

Satgas PRR Pantau Pasca Banjir

PADANG - Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.

Hal itu mengemuka dalam audiensi Walikota, Fadly Amran, bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim di Gedung Putih, Kediaman Resmi Walikota, Selasa (11/8).

Juga hadir di kesempatan itu unsur Forkopimda Padang, sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Padang, serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, dan unsur terkait lainnya.

Usai audiensi, Satgas PRR bersama Walikota dan jajaran meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir cukup parah di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, yakni Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06. Peninjauan juga dilakukan ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah.

Fadly Amran menyampaikan, banjir 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua setelah Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi ini menunjukkan masih adanya titik rawan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat, sehingga usulan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diperbarui agar mencakup seluruh kawasan terdampak.

Fadly Amran menyebutkan, total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar. Usulan tersebut meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan By-pass depan Kantor Walikota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.

Sementara itu, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang menilai langkah Pemko dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam penanganan darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, banjir 3 Agustus di Padang merupakan kejadian berulang yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam, termasuk terhadap usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk.

Yopie menambahkan hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen R3P. (103)



BERSAMA - Walikota, Fadly Amran, bersama Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim pantau lokasi bekas banjir. (prokopim)

Unand Serahkan Genset Tenaga Surya ke Masyarakat Batu Busuk

PADANG - Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas (Unand) melalui Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) 2026 membantu masyarakat menghadapi persoalan keterbatasan pasokan listrik pascabencana di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh.

Adapun dalam kegiatan bertajuk "Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemandirian Energi Pascabencana" digelar pada Kamis (6/8) di Huntara Sanggar Seni Tradisi Adat Budaya Minangkabau Palito Nyalo ini, Tim Pengabdian Unand ini menyerahkan langsung Genset Tenaga Surya.

Ketua Tim Pengabdian Unand, Prof. Syafii pada kesempatan itu menyampaikan sistem tenaga surya dapat menjadi salah satu solusi praktis ketika jaringan listrik utama mengalami gangguan.

"Berbeda dengan genset berbahan bakar minyak, genset tenaga surya memanfaatkan energi matahari untuk mengisi baterai sehingga tidak



SANGGAR - Tim Pengabdian Unand bersama pihak Sanggar Seni Tradisi Adat Budaya Minangkabau Palito Nyalo dan sejumlah masyarakat Batu Busuk, usai pelaksanaan kegiatan bertajuk "Pemberdayaan Masyarakat melalui Ke-mandirian Energi Pascabencana", Kamis (6/8) di Batu Busuk, Limau Manis. (151)

memerlukan pasokan bahan bakar secara terus-menerus," katanya.

Dia juga memaparkan teknologi yang diterapkan dalam program ini berupa PV Power Station atau genset tenaga surya yang dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan bagi masyarakat. Sistem tersebut dirancang untuk melayani kebutuhan dasar seperti penerangan, pengisian telepon genggam dan perangkat komunikasi, laptop, sound

system, serta peralatan elektronik penting lainnya.

"PV Power Station dilengkapi dengan panel surya, MPPT solar charger, baterai lithium, inverter pure sine wave, keluaran AC 220 Volt dan DC, serta sistem monitoring. Karakteristiknya yang portabel juga memungkinkan perangkat dipindahkan sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Prof. Syafii.

Sementara itu, Ketua Komunitas Seni Tradisi Adat Budaya Minangkabau Palito Nyalo, Dasrul kalau bantuan

dari tim Pengabdian Unand ini sangat membantu karenaketersediaan energi listrik menjadi bagian penting dalam mendukung latihan seni, penggunaan perangkat audio, penerangan pada malam hari, dan aktivitas masyarakat yang berpusat di sanggar.

Dalam konteks pascabencana, energi juga berperan dalam menjaga akses komunikasi. Telepon seluler dan perangkat komunikasi dapat terus digunakan apabila tersedia sumber energi cadangan, sehingga koordinasi masyarakat dalam kondisi darurat dapat berlangsung lebih baik.

"Sanggar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan dan pelestarian seni Minangkabau, tetapi juga menjadi salah satu ruang aktivitas sosial masyarakat. Karena itu, keberadaan sumber listrik alternatif dinilai penting untuk memperkuat fungsi sanggar, terutama ketika terjadi gangguan pasokan listrik pascabencana," tuturnya.

Pada kesempatan itu juga disampaikan panduan teknis

dan demonstrasi penggunaan PV Power Station, mulai dari pengoperasian, pengisian daya, pemantauan sistem, hingga penggunaan keluaran AC/DC secara aman yang disampaikan oleh Fakri Naufal dan Imra Nur Izrillah kepada mitra dan peserta kegiatan.

Tak hanya sampai di penyerahan genset tenaga surya, program ini juga mencakup pelatihan, pendampingan, pemeliharaan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan energi secara aman dan efisien.

"Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam program ini karena keberlanjutan teknologi sangat ditentukan oleh kemampuan pengguna dalam mengelola fasilitas yang tersedia.

Hilirisasi Hasil Riset Universitas

Teknologi PV Power Station yang diperkenalkan kepada masyarakat juga menjadi bagian dari upaya hilirisasi hasil penelitian perguruan tinggi," kata Prof. Syafii usai kegiatan.

Seperti diketahui sebelumnya, Tim Unand telah mengembangkan sistem stasiun tenaga surya portabel berbasis Internet of Things dengan keluaran AC/DC adaptif. Teknologi tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Batu Busuk agar lebih sederhana, mudah dioperasikan, dan sesuai untuk kondisi pascabencana.

Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak berhenti pada tahap purwarupa atau publikasi ilmiah, tetapi dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Prof. Syafii, program ini juga menunjukkan pentingnya sinergi antara penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pemberdayaan komunitas. Teknologi yang dihasilkan perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan dampak nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi risiko bencana. (wy)

Sushi 99.1 fm
Radio Orang Padang

STUDIO & KANTOR :
Gedung Harian Umum SINGGALANG
Jl. Veteran No. 17 Padang Lt 2 Telp. (0751) 37315 Fax. (0751) 33572
082385264484 - 085768043251

M radiosushifm25@gmail.com
@radiosushifm
@radiosushifm
08126600991
www.radiosushifmpadang.com

GAS
Gebyar Agustus Spesial

LEXI LX 155

DP MULAI 1.6Jt* Angkutan/Bulan 1.387Jt*

QR Code

MENARA AGUNG

BEAT

HONDA One HEART.

SALES DISKON UP TO 555.000

Free Jacket

Banjir Informasi Kesehatan, Krisis Literasi

Oleh Annisa Wahyuni, S.K.M.,
M.Kes
Dosen Universitas Baiturrahmah

SETIAP kali tubuh terasa tidak enak, gerakan pertama banyak orang hari ini bukan lagi menelepon puskesmas atau bertanya kepada dokter keluarga, melainkan membuka aplikasi media sosial. Cukup mengetik gejala pada kolom pencarian TikTok atau Instagram, dalam hitungan detik puluhan video bermunculan: mulai dari penjelasan dokter yang kredibel, testimoni warganet biasa, hingga penjual suplemen yang menjanjikan kesembuhan instan. Fenomena ini bukan kebetulan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2026 mencatat konten kesehatan dan gaya hidup sebagai jenis berita paling banyak diakses warganet, mencapai 20,3 persen dari seluruh konsumsi berita daring. Kementerian Kesehatan bahkan mencatat sebanyak 38 persen masyarakat Indonesia mencari informasi kesehatan pertama kali melalui media sosial, mengalahkan situs resmi kesehatan maupun konsultasi langsung ke tenaga medis.

Fenomena ini semestinya menjadi kabar baik karena masyarakat kini lebih peduli pada kesehatannya, dan informasi tidak lagi menjadi barang langka yang hanya bisa diperoleh di ruang praktik dokter. Namun di balik derasnya arus informasi ini, tersembunyi persoalan yang justru semakin mengkhawatirkan yakni



banyaknya informasi tidak serta-merta diikuti oleh membaiknya kemampuan masyarakat untuk menilai mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Sebuah studi yang terbit di Journal of Public Health pada Maret 2025 menemukan bahwa hampir separuh responden penyandang penyakit kronis di Indonesia memiliki tingkat literasi kesehatan yang problematik atau tidak memadai. Penelitian lain di tingkat puskesmas bahkan menemukan angka yang lebih mengkhawatirkan, dengan 60 hingga 80 persen responden berada pada kategori literasi kesehatan rendah hingga sangat rendah. Artinya, kita sedang menghadapi paradoks, dimana informasi kesehatan melimpah, tetapi kemampuan mencernanya tertinggal jauh di belakang. Paradoks ini terlihat nyata

dalam keseharian. Hoaks kesehatan masih rutin beredar dan dipercaya begitu saja, mulai dari klaim bahwa air kelapa dapat menyembuhkan segala jenis penyakit ginjal, hingga anggapan bahwa vaksin menyebabkan efek samping yang tidak pernah dibuktikan secara ilmiah. Klaim obat dan suplemen yang menjanjikan hasil instan—menurunkan berat badan dalam hitungan hari, menyembuhkan diabetes tanpa obat dokter—terus laris meski tidak memiliki dasar bukti yang memadai. Fenomena self-diagnosis pun kian marak, terutama di kalangan generasi muda yang mendiagnosis diri mengidap gangguan kecemasan atau penyakit tertentu hanya berdasarkan video singkat berdurasi satu menit, tanpa pernah berkonsultasi dengan tenaga profesional. Informasi viral tentang wabah, efek

samping obat, atau metode pengobatan alternatif pun kerap dipercaya dan disebarluaskan lebih cepat daripada klarifikasi resminya sendiri.

Guna memahami mengapa hal ini terjadi, kita perlu kembali pada definisi literasi kesehatan yang sesungguhnya. Literasi kesehatan bukan sekadar kemampuan membaca tulisan berisi informasi kesehatan. Ia adalah kemampuan yang jauh lebih kompleks: kemampuan mengakses informasi yang relevan, memahami isinya dengan tepat, menilai kredibilitasnya, hingga menggunakannya untuk mengambil keputusan yang tepat bagi kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Seseorang bisa saja lancar membaca sebuah unggahan tentang khasiat suatu ramuan, tetapi jika ia tidak

mampu menilai apakah klaim tersebut didukung bukti ilmiah atau sekadar testimoni tanpa dasar, maka literasi kesehatannya tetap rendah, betapapun tingginya kemampuan baca-tulisnya secara umum. Di Sumatera Barat, tantangan ini memerlukan perhatian bersama, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata. Keluarga adalah ruang pertama tempat kebiasaan menyaring informasi kesehatan mulai dibentuk, sementara sekolah adalah tempat generasi muda semestinya dilatih berpikir kritis terhadap apa pun yang mereka temui di layar gawai. Puskesmas dan rumah sakit, sebagai sumber informasi yang paling dekat dengan masyarakat, perlu hadir tidak hanya menunggu pasien datang, tetapi juga menjem put bola ke ruang digital tempat masyarakat mencari jawaban. Kader kesehatan di tingkat nagari dan kelurahan, yang selama ini menjadi jembatan antara tenaga medis dan masyarakat, juga perlu diperkuat kapasitasnya agar mampu meluruskan informasi yang keliru sebelum berkembang menjadi keyakinan yang sulit diubah. Pemerintah daerah, pada gilirannya, perlu memandang literasi kesehatan sebagai bagian dari infrastruktur kesehatan publik, sama pentingnya dengan pembangunan fasilitas fisik. Beberapa langkah konkret dapat mulai dilakukan secara serentak. Edukasi kesehatan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana,

bukan bahasa teknis yang hanya dipahami kalangan medis. Infografis dan materi visual yang mudah dicerna perlu diperbanyak, mengingat masyarakat kini terbiasa mengonsumsi informasi secara cepat dan ringkas. Tenaga kesehatan, dari dokter hingga bidan dan perawat, perlu dibekali kemampuan komunikasi yang lebih baik agar penjelasan mereka di ruang periksa tidak kalah menarik dibanding video singkat di media sosial. Literasi digital semestinya diajarkan sejak bangku sekolah, bukan sekadar cara menggunakan aplikasi, melainkan cara menilai kredibilitas sebuah sumber. Puskesmas perlu didorong lebih aktif hadir di media sosial, menyajikan informasi kesehatan yang benar dengan kemasan yang tidak kalah menarik dari konten yang menyesatkan. Hal yang tidak kalah penting, masyarakat perlu dibiasakan untuk bertanya sederhana sebelum memercayai sebuah informasi kesehatan: siapa yang menyampaikan, apa dasar buktinya, dan apakah sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah banjir informasi, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi. Mereka harus dibekali kemampuan untuk memilih informasi yang benar. Sebab dalam urusan kesehatan, informasi yang salah bukan sekadar membuat seseorang keliru memahami sesuatu, tetapi dapat mengubah keputusan yang menentukan hidupnya. (***)

Menembus Ketimpangan: Menjadikan 'Adil dan Makmur' Bukan Sekadar Slogan

Oleh Firza
Dosen Departemen Sejarah, FIS
UNP

Setiap Agustus, merah putih kembali berkibar di rumah, sekolah, kantor, pasar, hingga jalan-jalan antarnagari. Lagu perjuangan diperdengarkan

dan kisah para pendiri bangsa dikenang. Namun, setelah 81 tahun merdeka, peringatan semestinya tidak berhenti pada seremoni. Ia perlu menjadi momentum untuk bertanya: sejauh mana kemerdekaan telah menghadirkan kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera bagi seluruh rakyat?

Pertanyaan itu makin

relevan pada HUT ke-81 RI yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat karena logo resmi tahun ini adalah karya Fajar Novario, desainer muda asal Padang, yang terpilih melalui pemungutan suara publik dengan 44,73 persen suara. Menariknya, Fajar adalah alumnus Universitas Negeri Padang. Ia berkembang dari kampus di daerah, lalu karyanya dipilih menjadi identitas nasional. Justru di situ terletak pesan yang paling dekat dengan tema tahun ini: talenta daerah mampu bersaing di panggung nasional apabila diberi kesempatan. Karena itu pula, tiga kata "berdaulat, adil, dan makmur" tidak boleh berhenti sebagai slogan pada spanduk dan baliho. Ia harus menjadi ukuran sejauh mana pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.

Sumatera Barat memiliki capaian yang patut diapresiasi. BPS mencatat ekonomi daerah pada triwulan II-2026 tumbuh 4,54 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan pada Maret 2026 angka kemiskinan turun menjadi 5,27 persen. Namun statistik yang sama mengingatkan kita untuk tidak berhenti pada rata-rata. Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di perko taan tercatat 3,82 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 6,88 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan bahkan 1,052, lebih dari dua kali nilai di perkotaan yang sebesar 0,482, menandakan pengelua ran penduduk miskin desa jauh lebih tertinggal dari garis kemiskinan.

Gini Ratio Sumbar pada Maret 2026 berada di 0,285, sedikit naik dari 0,280 pada September 2025. Ini bukan alasan untuk mengatakan ketimpangan sudah mengkhawatirkan, tetapi cukup menjadi pengingat bahwa pertumbuhan dan pemerataan harus berjalan bersama. Sebab kemakmuran bukan hanya soal seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan juga siapa yang menikmati pertumbuhan itu.

Kedaulatan pada abad ke-21 berbeda dengan masa mempertahankan wilayah dari penjajahan. Hari ini, kedaulatan berarti kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, dan memiliki daya tawar ekonomi. Bagi Sumatera Barat, hal itu tak mungkin dilepaskan dari sektor pertanian. Dari sekitar 3,03 juta penduduk yang bekerja pada Mei 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 33,46 persen tenaga kerja, yang terbesar. Artinya, di sawah, ladang, dan kebun itulah kehidupan ratusan ribu keluarga bertumpu.

Karena itu, kedaulatan pangan tidak cukup berbicara tentang berapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga tentang nasib mereka yang memproduksi sinya. Petani membutuhkan harga yang layak, akses pembiayaan, pupuk, infor masi pasar, serta perlintu ngan ketika harga bergejolak. Tidak cukup sebuah daerah menjadi penghasil pangan bila mereka yang berada di rantai produksi paling awal justru memperoleh bagian nilai ekonomi paling kecil.

Dalam konteks Minangkabau, pembangunan

memiliki ruang sosial yang khas: nagari. Ia bukan sekadar wilayah administra- tif, melainkan tempat kehidupan sosial, ekonomi, adat, dan identitas masyarakat bertemu. Upaya menembus ketimpangan semestinya memperkuat kemampuan nagari berkembang berdasarkan potensinya sendiri, entah pertanian, perikanan, kerajinan, kuliner, atau pariwisata. Potensi itu sulit tumbuh tanpa jalan yang baik, konektivitas digital, akses pembiayaan, dan kedekatan dengan pasar. Keadilan bukan berarti menyeragamkan semua nagari, melainkan memberi setiap wilayah kesempatan berkembang dari kekuatan yang dimilikinya.

Di sinilah nilai lokal Minangkabau menjadi relevan. Tradisi merantau memperlihatkan kemampuan orang Minang mencari peluang dan beradaptasi. Namun merantau semestinya menjadi pilihan, bukan keterpaksaan karena kesem patan tak tersedia di kam pung sendiri. Anak muda boleh pergi jauh mengejar cita-cita, tetapi nagari juga harus mampu menyediakan alasan bagi mereka untuk kembali.

Ketimpangan juga tidak cukup dilihat dari angka pengangguran. Pada Mei 2026, dari sekitar 3,03 juta orang yang bekerja, 1,93 juta atau 63,80 persen berada pada kegiatan informal. Angka itu memberi pelajaran penting: bekerja belum tentu berarti memiliki keamanan ekonomi. Petani kecil, peda gang pasar, dan pelaku usaha mikro memang mempunyai pekerjaan, tetapi jauh lebih rentan ketika keluarga sakit,

harga naik, atau panen menurun. Tantangan pembangunan bukan sekadar menciptakan sebanyak mungkin pekerjaan, melainkan meningkatkan kualitas dan produktivitasnya agar pendapatan dan perlindungan ekonomi membaik.

Delapan puluh satu tahun lalu, para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan politik. Perjuangan hari ini berbeda: memastikan kemerdekaan juga berarti kemerdekaan dalam memperoleh kesempatan. Kemerdekaan menjadi nyata ketika anak yang lahir di sebuah nagari memiliki akses pendidikan yang baik, ketika petani tak selalu berada pada posisi paling lemah dalam menentukan harga, dan ketika masyarakat tidak kehilangan peluang hanya karena hidup jauh dari pusat kota. Keadilan bukan berarti semua orang memperoleh hasil yang sama, melainkan tidak ada warga yang peluang hidupnya ditentukan semata oleh tempat ia dilahirkan atau jaraknya dari pusat pertumbuhan.

Maka ketika merah putih berkibar di setiap sudut Sumatera Barat, pertanyaan kita bukan hanya seberapa meriah kemerdekaan diraya kan, melainkan seberapa jauh ia telah dirasakan sebagai kesempatan untuk hidup lebih baik. Kemerdekaan memberi bangsa ini hak menentukan masa depan; keadilan memastikan setiap warga dapat mengambil bagian di dalamnya. Itulah perjuangan setelah 81 tahun Indonesia merdeka: menem bus ketimpangan agar "adil dan makmur" tidak sekadar menjadi slogan. (***)

— TAJUK —

Pemulung Jadi Pekerja Pemilah Sampah

Di mata publik, pemulung adalah orang punya pekerjaan memungut sekaligus memilah sampah. Jumlah mereka banyak di sekitar kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah atau di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Di sana, mereka memeriksa tumpukan sampah. Dan sampah-sampah yang bisa mereka jual seperti kertas koran, buku, karton, botol plastik bekas air minum, aluminium dan lainnya, diambil dan dikumpulan lalu dijual kepada pedagang loakan.

Tadinya mereka disebut pengumpul sampah. Dan akhirnya trend disebut pemulung. Tapi lama-lamanya profesi pemulung ini dianggap rendah. Seringkali pada beberapa kasus mereka dile ehkan dan dihina. Padahal mayoritas mereka baik-baik. Karena tidak ada pekerjaan bagus yang didapat, maka menjadi pemulung jalan yang mereka tempuh.

Dewasa ini pekerjaan pemulung kian dianggap rendah. Profesi papan bawah. Hanya dilakoni orang yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan lebih baik. Meski sosoknya baik, taat ibadah, tapi sebagai pemulung, kerap direndahkan. Begitulah, pemulung.

Dan fenomena itu, direspon oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat. Dia mengusulkan agar istilah pemulung diganti menjadi pekerja pemilah sampah sekaligus mendorong pekerja pemilah sampah diberikan standar kompetensi.

Hal itu disampaikan Jumhur dalam acara peluncuran perlindungan sosial bagi sektor informal persampahan Indonesia di fasilitas RDF Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8/2026).

Jumhur menilai pekerja pemilah sampah memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah. Mereka berada di garis depan dalam memilah sampah sebelum masuk ke fasilitas pengolahan. Pekerja pemilah sampah ini juga sebagai green collar workers. Mereka memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan sampah dari tingkat paling dasar.

Usul bagus. Dan kata pemulung bukanlah kata kasar, tapi kedengarannya kurang pas di era kekinian. Beda dengan kata pelacur yang dinamakan pekerja seks komersil (PSK). Kata pelacur, jelas konotasinya negatif, sedang pekerja seks komersil, masih ada yang menganggap itu sebuah pekerjaan profesi.

Tak heran, ada pihak yang menentang kata-kata pelacur dihaluskan menjadi pekerja seks komersil. Atau kata-kata lonte maupun juga poyok. Kata-kata ini dianggap kasar sehingga diganti menjadi pekerja seks komersil. Tapi itu tadi, pekerja seks komersil dianggap sebuah pekerjaan atau profesi. Sedangkan pelacur, lonte atau poyok, kata-katanya kasar yang konotasinya negatif. Kembali ke pemulung, memang pas dan lebih terhormat diganti dengan pekerja pemilah sampah. Semoga terlaksana hendaknya. (**)

SINGGALANG

Pemimpin Umum: H. Basril Djabar **Penasehat Hukum:** Dr.H. Amiruddin, SH,MH
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Khairul Jasmi. **Wakil Pemimpin Redaksi** Sawir Pribadi, Widya Navies
Pemimpin Perusahaan: Hj. Rilianty **Dewan Redaksi:** H. Basril Djabar, Khairul Jasmi, Sawir Pribadi, Widya Navies. **Redaktur Pelaksana:** Gusnaldi Saman. **Korlip:** Eriandi, Soesilo Abadi **Piliang Koordinator Mingguan:** A.R. Rizal **Redaktur:** Effendi, Aci Indrawadi, Dede Amri, Lenggogeni, Yuniar **Sidang Redaksi:** Khairul Jasmi, Sawir Pribadi, Widya Navies, Soesilo Abadi **Piliang, A.R. Rizal, Lenggogeni, Eriandi, Gusnaldi Saman, Yuniar, Aci Indrawadi, Dede Amri** **Reporter Padang:** Hendri Nova, Bambang Sulisto, Yoserizal, Deri Oktazulmi, Wahyu Alhadi, Yunisma, Septri Lediana. **Reporter Jakarta:** Eri Satria Dharma, Yusman Mahyuddin. **Koordinator Daerah Pasaman:** Chandra Firmam (Korda), **Tanah Datar:** - **Bukittinggi:** Asrial Gindo (Korda) **Padang Panjang:** Jasriman (Korda). **Pesisir Selatan:** Marlison (Korda) **Kota Solok:** Oky Adhadi (Korda) **Kabupaten Solok:** Rusmel Dt. Sati (Korda). **Sawahlunto:** Adamison (Korda) **Pariaman:** Darmansyah (Korda), Agus Suryadi **Agam:** Mursyidi (Korda). **Payakumbuh:** Jefri Ricardo Magno (Korda). **Limapuluh Kota:** - **Solok Selatan:** Hendriron (Korda) **Dharmasraya:** Ronny Aprianto, (Korda). **Pasaman Barat** : Arafat (Korda) **Sekretaris Redaksi:** Putri Juitta **Kabag Produksi:** Atria Efendi **Kabag Iklan:** Rika Yosmeri **Kabag Pemasaran** : Hj. Iva Tureyza Idroes, **Kepala Perwakilan Usaha Jakarta:** Soeparto Har. **Dewan Perusahaan:** H. Amiruddin, SH **Supervisi Personalia:** DR.H. Amiruddin, SH,MH.

Alamat Redaksi/Perusahaan: Jl.Veteran No.17, Padang, 25116 **Telepon:** (0751) 25001, 36923, 38338, 37306 **Faxs:** (0751) 33572 **e-mail:** singgalang.redaksi@gmail.com **Website:** www. hariansinggalang.co.id **Alamat Perwakilan Jakarta:** Graha Elgangga, Jln. Serma Marzuki No 30. RT005/RW002-Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Jawa Barat 17141. Hp0811861786-0818861786 **Telepon Iklan dan Sirkulasi:** (021) 3904751, 3904752, 3903312, 39029631 **Facs:** (021) 3929630 **Harga langganan:** (termasuk Edisi Minggu): Rp135.000 **Luar Kota Padang / Luar Provinsi Sumatra Barat:** tambah ongkos kirim **Tarif Iklan:** Halaman satu **Black and white** @ Rp32.000/mmk **Spot colour** @ Rp60.000/mmk **Full colour** @ Rp72.000/mmk **Halaman 2 sid Halaman 16 black and white** @ Rp16.000/mmk **Spot colour** @ Rp30.000/mmk **Full colour** @ Rp36.000/mmk **Iklan keluarga** @ Rp15.000/mmk **Iklan mini:** Tinggi maksimal 50 mm) @ Rp250.000/ muat **Iklan muka cita:** Rp12.500/mmk **Iklan Baris** (Min. 3 baris Maks 5 baris) @ Rp 15.000/baris

Pencetak: Unit Percetakan PT. Genta Singgalang Press (Padang) (Isi di luar tanggung jawab pencetak). **Alamat Jalan Veteran No. 17A**
Penerbit: PT Genta Singgalang Press (Anggota SPS) Izin: SK Menpen RI No.007/SK/MENPEN/SIUPP/A/1985, Tanggal 24 Oktober 1985.

PERKUAT TATA KELOLA DAN KETAHANAN NAGARI

S2 Magister PPKn Dampingi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan di Lasi

AGAM - SINGGALANG

Program Studi (S2) Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan itu dilaksanakan melalui skema Program Integrasi Prodi dan Nagari (PIPn) dengan mengusung tema "Pendampingan Good Local Governance dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Ketahanan Nagari di Nagari Lasi".

"Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas pemerintahan dan masyarakat nagari menuju tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan," kata Ketua Tim Pengabdian, Prof. Dr. Al Rafni, M.Si.

Prof Al Rafni mengatakan, kegiatan pengabdian dilaksanakannya bersama tim dosen Program Studi S2 Magister PPKn. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Nagari Lasi.

Wali Nagari Lasi, Andrizal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pendampingan yang menghadirkan perspektif akademik untuk mendukung pemerintah nagari dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Menurut Andrizal, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintahan nagari merupakan hal yang penting, karena berbagai persoalan di tingkat nagari membutuhkan penguatan pengetahuan, pendampingan, serta masukan dari berbagai pihak.

Kehadiran tim pengabdian diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi yang relevan dengan kebutuhan Nagari Lasi, khususnya dalam perencanaan pembangunan dan penguatan ketahanan nagari.

Materi disampaikan oleh Prof. Dr. Al Rafni, M.Si., mengenai pendampingan Good Local Governance dalam perencanaan



BERSAMA - Ketua Tim Pengabdian, Prof. Dr. Al Rafni, M.Si., bersama tim pengabdian dan perangkat Nagari Lasi foto bersama usai pelaksanaan kegiatan. (ist)

pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan ketahanan nagari di Nagari Lasi.

Prof. Al Rafni dalam pemaparannya menjelaskan, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nagari yang efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan nagari, lanjutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat dengan memperhatikan berbagai dimensi pembangunan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kelembagaan.

Prinsip-prinsip SDGs dapat menjadi kerangka dalam memastikan pembangunan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Selain itu, Prof. Al Rafni menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Masyarakat perlu dilibatkan sejak proses identifikasi kebutuhan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan nagari dapat berlangsung secara inklusif dan mampu

memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

Materi kedua disampaikan oleh Prof. Susi Fitria Dewi, Ph.D. dengan topik Penguatan tata kelola tanah ulayat berbasis Good local governance dalam mendukung SDGs dan ketahanan Nagari di Nagari Lasi. Materi ini mengangkat persoalan yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.

Prof. Susi menjelaskan, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, sejarah, dan identitas masyarakat adat. Dalam pemaparannya, Prof. Susi menekankan bahwa konflik pertanahan pada tanah ulayat perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, adat, sosial, serta kepentingan masyarakat.

Penyelesaian konflik membutuhkan dialog dan pendekatan yang mampu mempertemukan berbagai kepentingan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

Supardi menjadi salah satu peserta yang aktif berdiskusi dengan mengajukan pertanyaan

kepada kedua narasumber. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan penerapan prinsip Good Local Governance dalam perencanaan pembangunan nagari serta persoalan konflik dan pengelolaan tanah ulayat adat.

Diskusi tersebut memperkaya pemahaman peserta sekaligus membuka ruang untuk menghubungkan konsep akademik dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan pemerintahan nagari.

Melalui kegiatan PIPn ini, Program Studi S2 Magister PPKn berupaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah nagari, dan masyarakat. Pendampingan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan nagari yang lebih baik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah nagari dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan, sekaligus mendorong terwujudnya Nagari Lasi yang tangguh, partisipatif, berkelanjutan, dan berdaya saing. (008)

DILEPAS DARI PADANG PANJANG

762 Anggota Kontingen Pramuka Sumbang Menuju Jamnas XII

PADANG PANJANG - Sebanyak 762 anggota Gerakan Pramuka yang tergabung dalam Kontingen Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumatera Barat memulai perjalanan menuju Jambore Nasional (Jamnas) Pramuka XII-2026 di Jakarta. Kota Padang Panjang menjadi titik keberangkatan kontingen yang akan mengikuti kegiatan nasional tersebut pada 14-20 Agustus 2026.

Pelepasan kontingen dilakukan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat Audy Joinaldy, didampingi Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, dalam upacara di halaman Balaiikota Padang Panjang, Senin (10/8/2026).

Sebanyak 762 orang tergabung dalam kontingen Sumbang yang terdiri atas peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya.

Audy berpesan agar seluruh peserta tidak hanya mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, tetapi juga menjaga nama baik Sumbang selama berada di lokasi Jamnas. Menurutnya, peserta memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau sekaligus membangun persahabatan dengan Pramuka dari berbagai daerah.

"Selamat mewakili Sumatera Barat. Jaga sikap, perkenalkan budaya Sumbang dan miliki solidaritas serta persatuan dengan daerah lain," ujar Audy.

Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah memfasilitasi pelepasan kontingen Sumbang. Menurutnya, Jamnas menjadi kesempatan berharga bagi peserta untuk mendapatkan pengalaman baru, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mengikuti kegiatan kepramukaan berskala nasional.

"Kalian adalah orang-orang yang dipilih untuk mewakili Sumbang. Ini merupakan kebanggaan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman dan bertemu dengan Pramuka dari berbagai daerah," katanya.

Sementara itu, Wako Hendri yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Kwartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang mengatakan, keberangkatan dari Padang Panjang memiliki makna tersendiri. Dari kota ini, para peserta memulai perjalanan untuk membawa nama Sumbang ke tingkat nasional.

"Dari Kota Padang Panjang inilah adik-adik memulai perjalanan membawa nama Sumatera Barat. Kami berharap perjalanan ini menjadi awal dari pengalaman yang baik dan prestasi yang membanggakan," ujarnya.

Hendri mengingatkan peserta agar menjaga nama baik Sumbang melalui sikap disiplin, santun, mandiri, dan bertanggung jawab. Ia juga mendorong peserta memanfaatkan Jamnas sebagai ruang untuk memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta mengenal keberagaman budaya Indonesia.

Menurut Hendri, pengalaman selama Jamnas diharapkan tidak berhenti sebagai kenangan mengikuti kegiatan nasional, tetapi menjadi bekal bagi peserta untuk mengembangkan karakter, kepemimpinan, kemandirian, dan kedepulian terhadap lingkungan setelah kembali ke daerah.

Pelepasan tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Alex Saputra, Pj. Sekretaris Daerah Kuartini Deti Putri, Kepala Kantor Kementerian Agama Mukhlis M, Danyon Brimob Kompol Jendrival, serta sejumlah pejabat terkait. (205)



SOSIALISASI - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbang), Doni Harsiva Yandra, S.I.P., ME, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana, di Nagari Muaro Aie, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (8/8). (ist)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING
Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping - 26313 Telepon (0753) 20065, 20436
Email:C0269@corp.bri.co.id - Facsimile (0753) 20435

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping melalui Kantor Pelayanan Kelayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta atas objek Hak Tanggungan berupa:

1. DEBITUR : ASIR

Sebidang Tanah dengan Luas 2.626 M2 dan Bangunan, SHM No. 173 Atas nama Asir terletak di Jalan Sibatayo Nagari Malampah Kec Tigo Nagari Kab Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

Nilai Limit
Uang Jaminan

: Rp 125.000.000,-
: Rp. 13.500.000,-

Syarat-syarat Lelang :
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang Internet, yang dapat diakses pada alamat domain [lelang.go.id](#). Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran.
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](#) dengan melekam serta menggunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung kenomor tersebut).
3. Waktu Penawaran dan Penetapan Penawang.
Pelaksanaan lelang dengan jema lelang melalui internet (Open bidding) sebagai berikut :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak dimuat pada aplikasi lelang internet sampai dengan:

Hari
Tanggal
Waktu
Batas akhir Penawaran
Alamat Domain
Tempat Lelang

: Senin
: 31 Agustus 2026
: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
: 31 Agustus 2026 , Pukul 11.30 WIB (Sesuai waktu Server)
: [lelang.go.id](#)
: KPKNL Bukittinggi
: Jl. M. Yamin Nomor 60, Bukittinggi

Penetapan Penawang : Setelah Batas Akhir Penawaran
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang.
a. Peserta lelang diwajibkan menyertor uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
c. Uang jaminan lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan.
5. Penawaran Lelang.
a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada alamat email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyertor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan limit.
6. Pelaksanaan Lelang.
a. Pemernang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Pemernang lelang harus melunasi harga pembelian dan bes lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
c. Pengenaan BPHTB Atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Untuk melihat barang dan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat lainnya dapat langsung menghubungi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, Telp. 0753-4725674 CP: Rici Eka Putra (0852 6343 9356), Amelia Meyeni (0813 6345 8164).
8. Semua barang ditawarkan apa adanya. Segala bentuk kekurangan/kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang akan ditawarkan / dibeli.

Lubuk Sikaping , 12 Agustus 2026
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING

Fahmy Tias Karviga
Penampilan Cabang

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING
Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Lubuk Sikaping - 26313 Telepon (0753) 20065, 20436
Email:C0269@corp.bri.co.id - Facsimile (0753) 20435

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping melalui Kantor Pelayanan Kelayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi akan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui Aplikasi Lelang Internet (Open Bidding) dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta atas objek Hak Tanggungan berupa:

1. DEBITUR : BAHRAIN KHOIR

Sebidang Tanah dengan Luas 234 M2 dan Bangunan, SHM No. 1242 Atas nama Ahmad Rosidi terletak di Koto Nopan Setta Jorong V Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kab Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

Nilai Limit
Uang Jaminan

: Rp 320.000.000,-
: Rp. 32.000.000,-

Syarat-syarat Lelang :
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang Internet, yang dapat diakses pada alamat domain [lelang.go.id](#). Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.
2. Pendaftaran.
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [lelang.go.id](#) dengan melekam serta menggunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung kenomor tersebut).
3. Waktu Penawaran dan Penetapan Penawang.
Pelaksanaan lelang dengan joris lelang melalui internet (Open bidding) sebagai berikut :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak dimuat pada aplikasi lelang internet sampai dengan:

Hari
Tanggal
Waktu
Batas akhir Penawaran
Alamat Domain
Tempat Lelang

: Senin
: 31 Agustus 2026
: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
: 31 Agustus 2026 , Pukul 11.00 WIB (Sesuai waktu Server)
: [lelang.go.id](#)
: KPKNL Bukittinggi
: Jl. M. Yamin Nomor 60, Bukittinggi

Penetapan Penawang : Setelah Batas Akhir Penawaran
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
4. Uang Jaminan Lelang.
a. Peserta lelang diwajibkan menyertor uang jaminan lelang seperti tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang jeminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
c. Uang jaminan lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, kecuali ada biaya transaksi perbankan.
5. Penawaran Lelang.
a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada alamat email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyertor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan limit.
6. Pelaksanaan Lelang.
a. Pemernang lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Pemernang lelang harus melunasi harga pembelian dan bes lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
c. Pengenaan BPHTB Atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
7. Untuk melihat barang dan penjelasan lebih lanjut tentang syarat-syarat lainnya dapat langsung menghubungi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuk Sikaping, Telp. 0753-4725674 CP: Rici Eka Putra (0852 6343 9356), Amelia Meyeni (0813 6345 8164).
8. Semua barang ditawarkan apa adanya. Segala bentuk kekurangan/kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang akan ditawarkan / dibeli.

Lubuk Sikaping , 12 Agustus 2026
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG LUBUK SIKAPING

Fahmy Tias Karviga
Penampilan Cabang

ADV



MEMERIAHKAN ULANG TAHUN
SJS PLAZA KE-17TH
MENGELAKR KONSUMEN PROMO

**UNTUNG BERUNTUNG
HOKI KU SJS PLAZA**

PESTA HADIAH Bertubi-tubi

Periode
13 Februari - 15 Agustus

Pengumpulan
17 Agustus

#HargaMemikatLayananBersahabat



Mobil Ayla



Mobil Ayla

Motor



Motor



Motor



Motor



Motor



Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

